

No. 199 September 2022

# BaKTI News

[www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id)

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



**MEMANEN PALA BERKUALITAS  
UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK**

**MENUJU SANITASI AMAN  
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**MENIKMATI PESONA BENTANG ALAM  
BERBALUT BUDAYA RAMMANG-RAMMANG**

TIDAK DIPERJUALBELIKAN  
NOT FOR SALE

ISSN 1979-777X



9 771 979 777 057



**BaKTI**News  
MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA

ISSN 1979-777X

[www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id)

Penanggung Jawab **M. YUSRAN LAITUPA**  
**ZUSANNA GOSAL**  
Editor **VICTORIA NGANTUNG**  
**ITA MASITA IBNU**

Editor Foto **ICHSAN DJUNAED**  
Design & Layout **ICHSAN DJUNAED**  
Sirkulasi **KHAIRIL ANWAR**

Redaksi

**Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10, Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia Telp. +62 0411 832228 / 833383**

Email [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id) atau [baktinews@bakti.or.id](mailto:baktinews@bakti.or.id)

Facebook [www.facebook.com/yayasanbakti](https://www.facebook.com/yayasanbakti) Twitter [@InfoBaKTI](https://twitter.com/InfoBaKTI) Instagram [@InfoBaKTI](https://www.instagram.com/InfoBaKTI)

BaKTI**News** adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTI**News** adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTI**News** terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTI**News** disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTI**News** agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTI**News** juga dapat diakses di website BaKTI: [www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id) dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTI**News** dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTI**News** adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

*BaKTI**News** is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTI**News** aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTI**News** is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand Indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.*

*BaKTI**News** is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTI**News** is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTI**News** is also provided in an electronic version that can be accessed on [www.baktinews.bakti.or.id](http://www.baktinews.bakti.or.id) and can be sent electronically to subscribers with internet access.*

*BaKTI**News** is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.*

## **BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTI**News**** Contributing to BaKTI**News**

BaKTI**News** menerima artikel tentang praktik baik dan pembelajaran program pembangunan, hasil-hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua). Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata, menggunakan Bahasa Indonesia, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTI**News** akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTI**News** tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat.

*BaKTI**News** accepts articles about good practices and lesson learnt from development programs, applied research results, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1,100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.*

*Articles should also be sent with photos that illustrate the article. Our editor team will edit each article to ensure the language style and available space. BaKTI**News** does not provide fee for authors who contribute articles for this magazine.*

## **MENJADI PELANGGAN BaKTI**News**** Subscribing to BaKTI**News**

Anda dapat mengisi formulir yang tersedia pada laman BaKTI**News** Online [baktinews.bakti.or.id](http://baktinews.bakti.or.id) untuk dapat menerima majalah BaKTI**News** langsung ke email Anda setiap bulannya. Jika Anda tinggal di Makassar, Anda dapat mengambil majalah BaKTI**News** cetak di Kantor BaKTI setiap hari kerja.

*You may fill out the form available on the BaKTI**News** Online page to be able to receive BaKTI**News** magazine directly to your email every month. If you live in Makassar, you can pick up the printed BaKTI**News** magazine at the BaKTI office on weekdays.*

# Daftar Isi

BaKTI*News*

September 2022

No. 199

- 1** Interseksionalitas dan Inklusi  
Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**
- 5** Menuju Sanitasi Aman di Provinsi Sulawesi Selatan  
Oleh **HALIA ASRIYANI**
- 9** Bunda Paud Kabupaten Magelang Seorang Provokator  
Oleh **AYU PUTU EKA NOVITA**
- 13** Menikmati Pesona Bentang Alam Berbalut Budaya Rammang-Rammang (Bagian 2 - Selesai)  
Oleh **SLAMET RIADI**
- 17** No Child Left Behind  
Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 21** Merawat Toleransi dengan *Peacepreneurship*  
Oleh **ITA IBNU**
- 25** Krisis Iklim dalam Agenda Politik Elektoral 2024  
Oleh **SHOLAHUDIN AL AYUBI & AGUNG BUDIONO**
- 29** Dua Tahun Pandemi: Refleksi Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia  
Oleh **FUJI AOTARI & LAMIA PUTRI DAMAYANTI**
- 33** Memanen Pala Berkualitas untuk Masa Depan yang Lebih Baik  
Oleh **SUMARNI SITUMEANG**
- 37** Melahirkan Lebih Banyak Peneliti dan Ilmuwan di Indonesia  
Oleh **RATNA KESUMA & PETRA WIYAKTI BODROGINI**
- 40** Diskusi IG Live dan Podcast Basuara
- 41** Terbaru di Batukarinfo

Ilustrasi cover: Yusuf Ahmad/Yayasan BaKTI

**D**

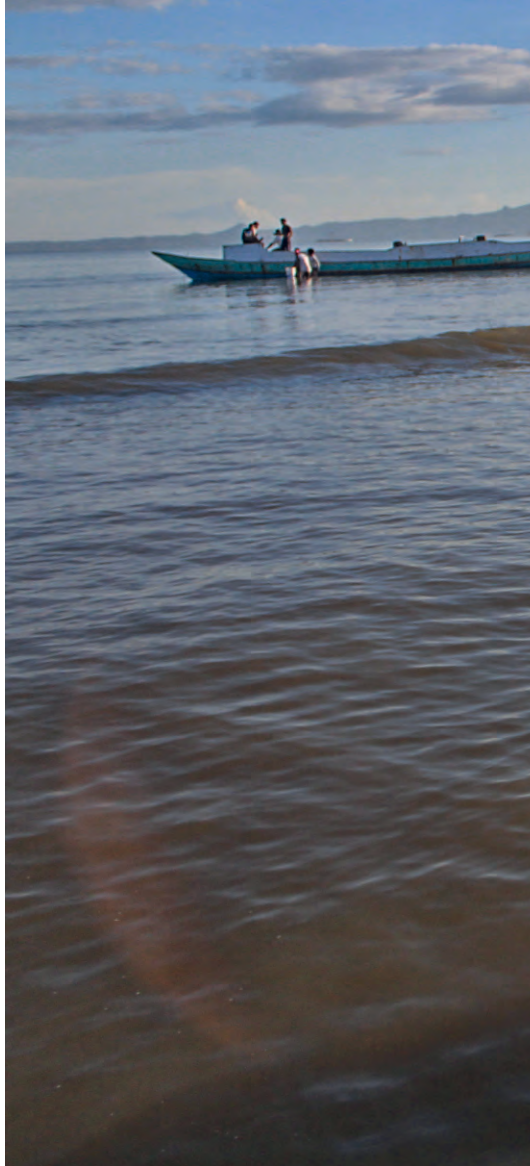
iskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok marjinal, miskin, minoritas, dan rentan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja atau alamiah. Dengan kata lain, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Melainkan melalui proses yang panjang, entah diproduksi, dilegitimasi, dan dipelihara, sehingga tumpang tindih dan sulit diidentifikasi dan dijelaskan.

Hal yang terjadi kemudian adalah masing-masing pihak menilai dan menjelaskan kondisi tersebut, tidak hanya untuk mencari akar dan menyelesaikan masalahnya, tetapi juga menyalahkan kelompok-kelompok yang ada atau pun faktor alam. Akhirnya, kelompok-kelompok tersebut sering dituding dan dicap sebagai pembawa masalah dan penghambat kemajuan dan pembangunan.

Pemikiran yang melahirkan stigma, stereotipe, dan menyalahkan bukan karena para pemikir dan analis tidak kritis melihat kondisi dan fakta, melainkan karena ilmu pengetahuan itu sendiri adalah sesuatu yang diproduksi dan direproduksi sesuai kondisi, kebutuhan, dan kepentingan. Singkatnya ilmu pengetahuan tidak netral terhadap kepentingan dan kekuasaan.

### Diskriminasi Berlapis

Kelompok marginal, miskin, minoritas, dan rentan yang mengalami diskriminasi atau perbedaan berlapis di masyarakat dan kebijakan, disadari atau tidak karena kontribusi ilmu pengetahuan dalam mempertebal dan menjadikannya berlapis-lapis. Dalam kadar tertentu,



# INTERSEKSIONALITAS DAN INKLUSI

Oleh **M. GHUFRAN H. KORDI K.**



Foto: Deni Regianto

ilmu pengetahuan membuat pembedaan dan pemisahan sesuai dengan kepentingan penguasa atas nama pembangunan, atas nama ketertiban, bahkan atas nama Tuhan.

Mereka dikuantifikasi sebagai kelompok kecil yang disebut dengan istilah-istilah yang menyudutkan. Pemerintah Indonesia menyebutnya sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Etnis minoritas biasa disebut suku terasing, disabilitas atau difabel (*different ability*) disebut penyandang cacat atau orang cacat. Anak yang berhadapan dengan hukum disebut anak nakal. Penganut agama lokal disebut penganut animisme, dinamisme, atau orang kafir.

Pengelompokan dan penyebutan tersebut menempatkan kelompok marginal, miskin, dan

minoritas tersebut pada posisi yang semakin rentan dan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Kekerasan dalam bentuk verbal hingga penyerangan fisik sering dialami oleh kelompok-kelompok tersebut, karena stigma dan berbagai kebijakan bias yang melegitimasi. Pada banyak kasus, kekerasan terhadap kelompok marjinal, miskin, dan minoritas pun ditutupi oleh negara dengan berbagai alasan yang melemahkan dan semakin menyudutkan.

### **Interseksionalitas**

Kerentanan kelompok marginal, miskin, dan minoritas tidak selalu terlihat dan teridentifikasi karena pendekatan analisis yang biasanya hanya melihat dari satu sisi saja. Misalnya suatu kelompok hanya diidentifikasi sebagai miskin



dan minoritas saja, padahal pada diri mereka juga melekat jenis kelamin, identitas gender, disabilitas, agama, dan sebagainya. Kelompok atau individu mengalami diskriminasi dan kekerasan bukan hanya karena faktor minoritas yang melekat pada dirinya, tetapi bisa jadi karena faktor-faktor lainnya.

Suatu kelompok menjadi miskin, marginal, dan rentan bisa jadi karena mereka minoritas, misalnya penganut agama lokal atau penganut agama minoritas. Namun, di dalam kelompok minoritas tersebut terdapat perempuan, anak, difabel, dan transgender yang lebih rentan dari laki-laki dewasa. Di dalamnya masih diidentifikasi lebih lanjut, misalnya perempuan kepala keluarga, perempuan difabel, anak difabel, anak perempuan difabel, transgender difabel, dan seterusnya. Seseorang mengalami peningkatan kerentanan sesuai dengan status yang disandanginya. Penganut agama minoritas tentu rentan, tetapi perempuan penganut agama minoritas lebih rentan, perempuan kepala keluarga penganut agama minoritas mungkin jauh lebih rentan, begitu seterusnya.

Sayangnya, tingkat kerentanan tersebut tidak selalu terdeteksi dalam analisis dan

pembuatan kebijakan untuk menguatkan dan melindungi kelompok-kelompok rentan. Itulah yang mendorong para ahli mengenalkan interseksionalitas. Interseksionalitas adalah pendekatan yang mengakui bahwa berbagai identitas sosial, seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, orientasi seksual, ras dan etnis, agama, warna kulit, pendidikan, dan sebagainya, saling beririsan dan berinteraksi satu sama lain, yang dapat memperkuat diskriminasi dan pengucilan seseorang/kelompok dalam masyarakat.

Isu sentral bagi teori interseksionalitas adalah bahwa perempuan mengalami penindasan dalam konfigurasi-konfigurasi yang bervariasi dalam derajat intensitas yang bervariasi juga (Crenshaw, 1991; Ritzer, 2012). Penjelasan untuk variasi itu adalah bahwa semua perempuan mengalami penindasan secara potensial berdasarkan gender. Namun demikian, perempuan ditindas secara berbeda oleh perpotongan-perpotongan yang bervariasi dari susunan-susunan ketidaksetaraan sosial lainnya. Vektor-vektor penindasan dan hak istimewa itu, yang oleh Patricia Hill Collins (1990) disebut sebagai 'matriks dominasi' mencakup

bukan hanya gender, tetapi juga kelas, ras, lokasi global, pilihan seksual, dan usia. Variasi perpotongan-perpotongan demikian mengubah secara kualitatif pengalaman bagi seorang perempuan dan perubahan itu, keberagaman itu, harus diperhitungkan di dalam menyusun teori, menjelaskan, dan menilai pengalaman-pengalaman perempuan.

Perempuan penganut agama minoritas sebagaimana perempuan lainnya berpotensi mengalami diskriminasi dan bentuk kekerasan berdasarkan gender. Namun perempuan penganut agama minoritas ini mengalami diskriminasi dan kekerasan berdasarkan gender dan karena agama atau keyakinan yang dianutnya. Ini berarti perempuan penganut agama minoritas mengalami diskriminasi dan kekerasan, baik di dalam kelompok dan lingkungannya sendiri, maupun dari pihak luar.

### **Masyarakat Inklusif**

Upaya untuk mencegah dan mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok marginal, miskin, minoritas, dan rentan, untuk membentuk masyarakat inklusif, harus dilakukan dua hal secara bersamaan. Pertama, membuka akses dan ruang partisipasi untuk kelompok marginal, miskin, minoritas, dan rentan. Kedua, mengubah persepsi kelompok-kelompok sosial yang berkuasa untuk menerima dan menyediakan ruang interaksi secara terbuka.

Bagi kelompok marginal, miskin, minoritas, dan rentan, akses pada layanan dan fasilitas publik bukanlah sesuatu yang mudah. Di samping itu, layanan dan fasilitas publik yang disediakan memang dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok mayoritas dan berkuasa. Karena itu, layanan publik yang tersedia tidak ramah pada perempuan hamil, anak, disabilitas, lanjut usia, dan sebagainya.

Demikian juga pada ruang partisipasi, yang tidak sekadar memberi ruang dan tempat untuk kelompok marginal, miskin, minoritas,

dan rentan. Tetapi bagaimana mereka dapat menyatakan pandangan dan kepentingan yang diakomodasikan dalam kebijakan. Ini hanya bisa terjadi jika ada tindakan atau kebijakan afirmatif untuk memberi ruang dan mendorong bagi kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan.

Mengubah kondisi sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap kelompok marginal, miskin, minoritas, dan rentan, sehingga menjadi lebih inklusif dapat dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Karena kehidupan sosial yang diskriminatif dan eksploitatif sangat kompleks dan telah berurat akar sangat lama, bahkan mendapat legitimasi dari kebijakan dan atas nama pembangunan, budaya, atau penafsiran agama.

Kelompok mayoritas dan kelompok tertentu yang selama ini memperoleh hak-hak istimewa akan mempertahankan kondisi tersebut, karena mereka memperoleh keuntungan. Sementara pemberian hak-hak istimewa kepada kelompok sosial tertentu menyebabkan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok sosial lainnya, yang menjadi marginal, miskin, minoritas, dan rentan. Hak istimewa yang diperoleh suatu kelompok sosial bergantung pada diskriminasi dan penindasan pada kelompok sosial lainnya.

Karena itu, kehidupan yang inklusif hanya dapat diwujudkan oleh individu dan kelompok yang mau berbagi kehidupan dan jua ruang untuk semua manusia. Kehidupan inklusif mensyaratkan adanya akses yang sama pada ruang publik bagi individu dan kelompok. Dalam kehidupan bernegara, pemerintah dapat mengatur akses yang sama pada layanan publik dan partisipasi pada pembentukan kebijakan, tanpa adanya diskriminasi. Semua warga negara mempunyai hak yang sama sebagai warga negara dan sebagai manusia.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Informasi lebih lanjut tentang Program INKLUSI-BaKTI dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

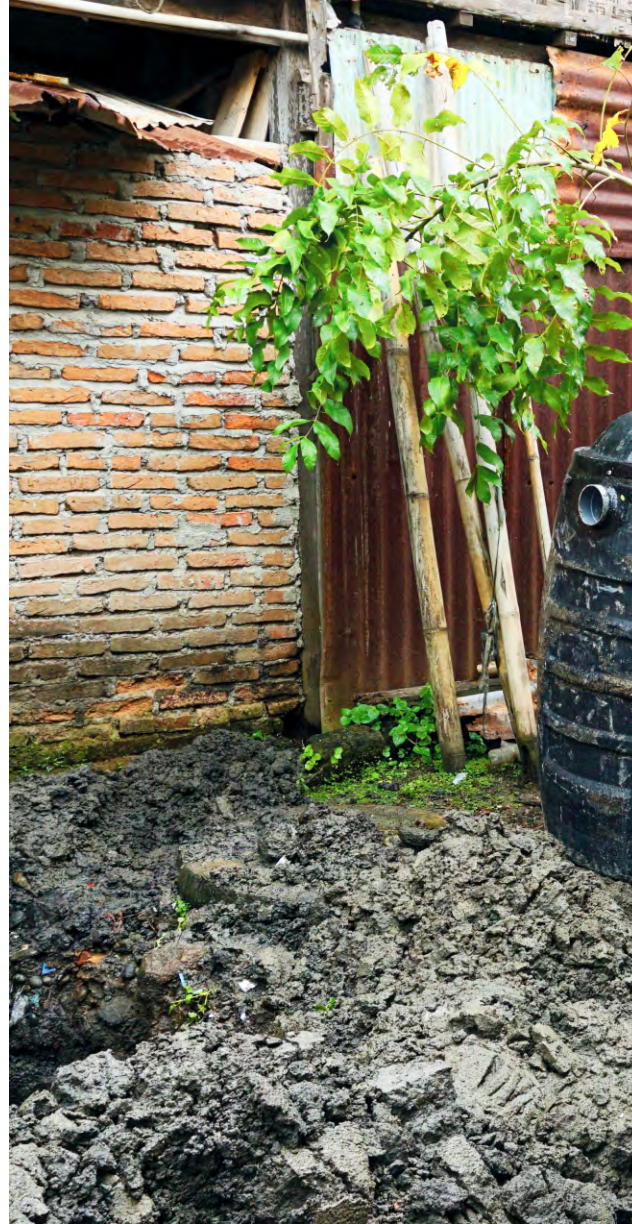
**K**

ata 'sanitasi' seringkali sanitasi diartikan sebagai kebersihan diri saja. Padahal sanitasi sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih

luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanitasi berarti usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. Sementara menurut WHO, sanitasi adalah usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang memberi efek, seperti merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Dapat dikatakan secara sederhana bahwa sanitasi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan baik tanah, air, maupun udara. Dengan demikian, sanitasi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat, bahkan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Akses sanitasi layak dan aman merupakan sebuah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.

### Mewujudkan Sanitasi Layak

Selain menjadi target nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, sanitasi layak juga memang menjadi target global. Sanitasi layak merupakan salah satu poin dalam Tujuan



# MENUJU SANITASI AMAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Oleh **HALIA ASRIYANI**





Foto: Halia Astriani/Vayasan BaKTI

Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada sektor lingkungan hidup (Goal 6) yaitu memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Sanitasi layak merupakan suatu kondisi di mana masyarakat telah mampu mengakses fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi ini salah satunya ditandai dengan status bebas dari praktik BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Perilaku BABS mengganggu kesehatan lingkungan karena berpotensi menyebarkan berbagai jenis kuman penyebab penyakit dari sanitasi yang tidak layak.

Mewujudkan sanitasi layak ini bukanlah perkara mudah. Ada banyak faktor yang menjadi

tantangan dalam mewujudkannya, diantaranya adalah pemahaman masyarakat tentang sanitasi bersih dan aman, kemampuan masyarakat menyediakan akses sanitasi yang layak, topografi dan kondisi wilayah, hingga sinergitas lintas sektor yang terlibat dalam mewujudkan sanitasi layak baik dari segi regulasi maupun penanganan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi yang berbeda sesuai penyebab masalah yang terjadi di setiap kasus yang ada.

Pekerjaan panjang inilah yang menjadi salah satu fokus kerja Program WASH (*Water Sanitation and Hygiene*) kerja sama UNICEF dan BaKTI. Sejak tahun 2015, program WASH telah mengupayakan dukungan bagi tercapainya

sanitasi layak di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Identifikasi wilayah yang masih memiliki kasus BABS pun telah dilakukan. Hingga tahun 2022 ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan, di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, sejumlah 21 dari 24 kabupaten atau sejumlah 95 persen wilayah telah dinyatakan bebas dari praktik BABS.

Upaya mendukung pemerintah provinsi dan daerah mencapai 100 persen akses sanitasi layak dimulai dengan melaksanakan studi kelompok *Last Mile* BABS. Kelompok *Last Mile* merupakan kelompok terakhir (rumah tangga atau individu) yang belum memiliki jamban ketika sebagian besar masyarakat telah menggunakan jamban. Studi berlangsung dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui akar penyebab masalah masih adanya sekelompok orang atau rumah tangga yang masih belum mengakses sanitasi jamban di tengah masyarakat yang sebagian besar telah bebas dari praktik BABS. Dari studi ini dihasilkan rekomendasi strategis dan inisiatif yang diharapkan dapat berkontribusi menyelesaikan masalah. Penyebarluasan informasi hasil studi ini pun telah dilakukan melalui lokakarya advokasi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada Januari 2022 lalu. Kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan penanganan masalah kelompok *Last Mile* tingkat kabupaten/kecamatan di masing-masing wilayah studi kelompok yaitu Kabupaten Maros, Pangkep dan Jeneponto, yang dilaksanakan pada Maret 2022. Kegiatan ini untuk merumuskan rencana aksi kolaboratif yang akan dikerjakan secara partisipatif bersama semua pihak terkait di lokus basis kelompok *Last Mile*.

### Tantangan Menuju Sanitasi Aman

Penyelenggaraan sanitasi aman di Sulawesi Selatan sendiri masih menghadapi banyak tantangan. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya adalah minimnya inisiatif yang mendukung peningkatan kualitas SDM yang menjadi *stakeholder* PALD (Pengelolaan Air Limbah Domestik) baik dari unsur regulator



maupun operator UPT PALD (Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik), minimnya regulasi kabupaten/kota yang mendukung peningkatan pengelolaan air limbah domestik, dan tidak sinkronnya pemahaman *stakeholder* tentang pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan dan standar operasional yang ada. Selain itu, kondisi sarana prasarana IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), sebagai sarana utama dan menjadi syarat mewujudkan pengelolaan sanitasi aman pun masih memerlukan berbagai pembenahan.



1 IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 2 Berbagi pengetahuan antara kabupaten/kota yang telah lebih maju dalam bidang pengelolaan air limbah domestik 3 Pelatihan database pelanggan layanan penyedotan lumpur tinja.  
Foto: Halia Asriyani/ Yayasan BaKTI

Di Provinsi Sulawesi Selatan, dari 24 kabupaten, sejumlah 16 kabupaten telah memiliki IPLT. Dari jumlah tersebut, tidak seluruhnya berfungsi dengan baik. Masih terdapat sejumlah IPLT yang memerlukan pembenahan baik dari segi fisik, maupun sistem pengelolaannya.

## Mempercepat Sanitasi Aman

Program WASH kerja sama UNICEF dan BaKTI terus memberikan dukungan dalam percepatan sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan melalui dukungan di kabupaten/kota. Intervensi diberikan berbeda-beda kepada kabupaten/kota berdasarkan hasil asesmen partisipatif yang dikerjakan bersama *stakeholder* pengelola air limbah domestik masing-masing. Salah satu dukungan yang diberikan adalah memfasilitasi pembelajaran secara horizontal bekerja sama dengan POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan) Sulawesi Selatan. Pembelajaran dalam hal ini adalah pertukaran pengetahuan antara kabupaten/kota yang telah lebih maju dalam bidang pengelolaan air limbah domestik dengan mengidentifikasi wilayah yang siap untuk melakukan pembenahan lebih lanjut terkait pengelolaan limbah domestik. Kegiatan ini pun melibatkan Kota Parepare, Pinrang dan Kota Palopo. Kabupaten/kota tersebut lalu melakukan pembelajaran dari pengalaman kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Gresik, yang telah berhasil menjalankan pengelolaan air limbah domestiknya dengan baik.

Mengingat penyelenggaraan sanitasi menuntut adanya *stakeholder* pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas maka Pelatihan Manajemen Air Limbah Domestik Provinsi Sulawesi Selatan juga dilakukan pada awal tahun 2022. Pelatihan ini untuk mendukung akselerasi penyelenggaraan sanitasi yang aman khususnya dalam pengelolaan air limbah domestik. Pelatihan yang diikuti oleh sembilan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ini, selain menjadi wadah pengetahuan baru mengenai pengelolaan sektor IPLT, juga teridentifikasi pula kebutuhan masing-masing IPLT untuk menjadi rujukan bersama berbagai pihak, terutama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun lembaga terkait lainnya dalam menyiapkan program intervensi.

Hingga pertengahan tahun 2022 ini, program WASH kerja sama UNICEF dan BaKTI



Instalasi jamban dengan tangki septik yang berstandar SNI di Kabupaten Pinrang.  
Foto: **Halia Asriyani/ Yayasan BaKTI**

bekerja mendukung percepatan sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan, melalui advokasi dan pendampingan di sejumlah kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Sidrap yang menjadi kabupaten target program WASH di Sulawesi Selatan. Program WASH di Kabupaten Sidrap dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dan asesmen kebutuhan yang mendukung terwujudnya sanitasi aman. Melihat kondisi Kabupaten Sidrap telah memiliki IPLT, maka program WASH di Kabupaten Sidrap berfokus pada pengembangan dan penguatan UPT PALD (Pengelolaan Air Limbah Domestik).

Dukung ini diawali dengan pembentukan UPT PALD, lalu dilanjutkan dengan penyusunan regulasi yang dibutuhkan terkait dengan PALD Kabupaten Sidrap. Melanjutkan komitmen pemerintah daerah, maka dibentuk tim teknis yang akan mendampingi proses ini dan menyusun regulasi yang diperlukan. Tim program WASH kerja sama UNICEF dan

BaKTI pun akan terus mendampingi proses ini sebagai bentuk dukungan atas upaya menuju sanitasi aman di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain Kabupaten Sidrap, program WASH juga tengah mendampingi Kabupaten Pinrang untuk mendukung percepatan pengelolaan sanitasi aman dan implementasi program LLTT (Layanan Lumpur Tinja Terjadwal). Hal ini mengingat Kabupaten Pinrang telah memiliki IPLT yang telah beroperasi, dikelola oleh UPT PALD, di bawah Dinas PUPR. Untuk mengawalinya, pelatihan *Inspection Tools* dan Survei Sanitasi Aman bagi Sanitarian telah dilakukan dengan diikuti perwakilan seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang pada 27-29 Juni 2022 lalu. Kegiatan ini untuk mengetahui akses air dan sanitasi, khususnya kondisi tangki septik rumah tangga yang ada di masyarakat.

Kabupaten Pinrang juga telah memiliki *database* layanan limbah domestik yang sangat berguna untuk mempersiapkan layanan lumpur tinja secara terjadwal. *Database* ini diperoleh melalui pendampingan penguatan database UPT PALD Kabupaten Pinrang oleh program WASH bekerja sama dengan Dinas PUPR Kabupaten Pinrang pada Oktober 2021.

Sebuah perjalanan panjang telah dilewati program WASH bersama berbagai pihak di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerja sama menuju sanitasi aman ini masih akan terus berlanjut, mengingat sanitasi layak dan aman merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Komitmen pemerintah serta dukungan berbagai pihak terkait menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penyelenggaraan sanitasi yang layak dan aman secara berkelanjutan.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Informasi lebih lanjut tentang Program Kerja Sama UNICEF-BaKTI dapat menghubungi [info@bakti.or.id](mailto:info@bakti.or.id)

# BUNDA PAUD KABUPATEN MAGELANG SEORANG PROVOKATOR

Oleh **AYU PUTU EKA NOVITA**

**K**

unjungan budaya ke Candi Borobudur di Kabupaten Magelang diawali dengan mengantri di loket tiket. Kami beli enam tiket, kata kami saat sampai di pintu tiket karena kami berenam.

"Ada Anak PAUD kah?", tanya petugas ramah karena di belakang kami ada beberapa ibu dengan anaknya.

"Tidak mbak", jawab kami. "Memangnya kenapa kalo ada anak usia dini?"

"Ooo kalo ada anak usia dini, gratis. Orang tua dan anaknya tidak dikenakan biaya tiket masuk karena kebijakan daerah"

"Kami kira promo, baru mau mendaftar jadi anak usia dini, hehe", ujar kami bercanda.

Ternyata keberpihakan bunda PAUD terhadap anak usia dini didukung oleh kebijakan daerah dengan memberikan kesempatan buat anak usia dini dan orangtua untuk mengenal budaya dengan menggratiskan biaya masuk candi.

---

Bunda PAUD Magelang, Ibu Christanti Zaenal Arifin, bersama anak-anak peserta PAUD. Sumber: **Dok. Dinas Kominfo Kabupaten Magelang**





Dok. Dinas Kominfo Kabupaten Magelang

Bunda PAUD Kabupaten Magelang dengan kapasitasnya sebagai Bunda PAUD sangat peduli terhadap Pembangunan pendidikan terutama pengembangan anak usia dini holistik integratif yang mengintegrasikan layanan pendidikan, kesehatan, pengasuhan dan kesejahteraan sosial.

Meningkatnya kualitas layanan pada anak usia dini menjadi pondasi terbentuknya sumber daya manusia yang unggul seperti yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Prioritas 2020-2024.

Bunda PAUD Kabupaten Magelang melihat implementasi Perpres No. 60 Tahun 2013 mengalami hambatan pada koordinasi pusat dan daerah. Kabupaten Magelang menginisiasi untuk membentuk Gugus Tugas PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) dan mendampingi O/P/D untuk dapat mengintegrasikan implementasinya di daerah melalui Rencana Aksi Daerah RAD PAUD HI Kabupaten Magelang. Kegiatan provokasi yang dilakukan oleh Bunda PAUD adalah memastikan setiap O/P/D berkontribusi pada Program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif melalui anggaran kegiatan daerah. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) adalah peningkatan layanan baik akses dan kualitas yang ditujukan untuk anak usia dini.

**Bunda PAUD Kabupaten Magelang mengawal lahirnya beberapa kebijakan daerah yang mengkonfirmasi keberpihakan pada pengembangan anak usia dini holistik integratif serta mengawal dukungan anggaran Dana Desa yang berpihak pada program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif melalui advokasi pada level Musrenbangdes.**

Sejak tahun 2013 PAUD HI sudah memiliki Perpres sebagai payung kebijakan, namun implementasinya tidak merata, begitu juga dukungan dari pusat dan daerah tidak terkoordinasi dengan baik sehingga terhambat sistem tata kelola pusat dan daerah, sehingga Bunda PAUD Kabupaten Magelang melihat peluang untuk mengimplementasikannya sebagai sebuah strategi peningkatan kualitas layanan yang terintegrasi bagi anak usia dini, baik dari segi kebijakan daerah dan tata kelola maupun keberpihakan anggaran daerah.

PAUD HI merupakan pembangunan manusia sejak usia dini untuk mewujudkan anak-anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. Anak usia dini merupakan periode pertama dan utama dalam siklus kehidupan manusia yang harus mendapat perhatian dari keluarga,

pemerintah, dan masyarakat. Investasi pada anak usia dini yang dimulai dari 0 sampai 6 tahun merupakan investasi terbaik dalam siklus kehidupan manusia yang menjadi landasan sekaligus menentukan perkembangan anak selanjutnya. Beberapa praktik baik dari implementasi PAUD-HI di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut antara lain dalam beberapa bidang berikut.

### **Bidang Pendidikan Anak Usia Dini**

PAUD-HI Kabupaten Magelang memastikan integrasi indikator PAUD-HI Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Renstra DISDIKBUD, meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terutama untuk masyarakat miskin melalui integrasi program pada OPD yang terkait dengan program PAUD HI dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik PAUD (pelaksanaan diklat berjenjang bagi pendidik PAUD, pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi pendidik PAUD) baik yang dilakukan oleh Kemendikbud maupun mitra pembangunan.

### **Bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini**

PAUD-HI Kabupaten Magelang mengintegrasikan indikator PAUD HI bidang Kesehatan dan Gizi Anak Usia Dini dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang dan SKPD terkait. Selain indikator yang diadopsi dari indikator di Rencana Aksi Nasional (RAN), Kabupaten Magelang juga memasukkan indikator persentase balita *stunting* sebagai indikator pada bidang Kesehatan dan gizi anak usia dini, yang kemudian diintegrasikan ke dalam kegiatan/program Perangkat daerah dan pihak-pihak terkait, sehingga penanganan terhadap kesehatan dan gizi anak usia dini lebih diperhatikan.

### **Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini**

Kabupaten Magelang mengintegrasikan indikator PAUD HI Bidang Perlindungan, Pengasuhan, dan Kesejahteraan Anak Usia Dini pada Renstra DINSOS PPKB PPPA Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, DISDIKBUD serta Perangkat Daerah lain yang terkait. Selain itu juga memfasilitasi kegiatan *parenting* untuk orang tua siswa guna meningkatkan kemampuan interpersonal dan praktik-praktik

baik pola pengasuhan anak PAUD dan mempermudah dan meningkatkan pelayanan akta kelahiran bagi anak, salah satunya dengan kerja sama DISDUKCAPIL dan Lembaga PAUD yang mana bagi anak-anak PAUD yang belum memiliki AKTA Kelahiran bisa mendapat pelayanan kolektif yang dikoordinir oleh Lembaga PAUD.

### **Bidang Tata Kelola**

Mengeluarkan Peraturan Bupati tentang PAUD-HI Nomor 44 Tahun 2019, memastikan adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) PAUD-HI dan Gugus Tugas PAUD-HI yang berperan aktif di tingkat kabupaten dan kecamatan. Selain itu Kabupaten Magelang juga mengintegrasikan PAUD-HI dalam dokumen perencanaan yaitu pada dokumen *masterplan* Pendidikan dan Rencana Strategis (Renstra) dinas-dinas terkait peran aktif bunda PAUD Kabupaten dan Bunda PAUD Kecamatan dalam implementasi PAUD-HI, serta mendorong komitmen pihak-pihak terkait dalam mendukung PAUD-HI meningkatkan koordinasi antar dan lintas sektor.

Bunda PAUD Kabupaten Magelang juga mengawal lahirnya beberapa kebijakan daerah yang mengkonfirmasi keberpihakan pada pengembangan anak usia dini holistik integratif serta mengawal dukungan anggaran Dana Desa yang berpihak pada program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif melalui advokasi pada level Musrenbangdes.

Hingga saat ini, Bunda PAUD Kabupaten Magelang aktif memastikan peraturan daerah yang mendukung implementasi PAUD HI. Kinerja Bunda Paud Kabupaten Magelang yang luar biasa ini tentunya berkat dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam peran masing-masing organisasi perangkat daerah. Semoga dengan meningkatnya kualitas layanan pengembangan anak usia dini, terjadi juga peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul di Kabupaten Magelang sehingga dapat mempersiapkan anak usia dini untuk menempuh pendidikan dasar dan mempercepat ketercapaian bonus demografi Kabupaten Magelang.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Penulis adalah staf Direktorat Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/BAPPENAS dan dapat dihubungi melalui email [ayu.eka@support.bappenas.go.id](mailto:ayu.eka@support.bappenas.go.id)

# MENIKMATI PESONA BENTANG ALAM BERBALUT BUDAYA RAMMANG-RAMMANG

Bagian II -Selesai  
Oleh **SLAMET RIADI**

**S**elain menghasilkan kepercayaan simbolik dalam bentuk pesan dari leluhur, interaksi bentang alam (karst, sungai, perkebunan, sawah, dan tambak) dengan masyarakat di Rammang-Rammang, juga menghasilkan

suatu tradisi lisan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat sejak dulu. Tradisi lisan ini dilantunkan dengan petikan gambus yang berpadu dengan syair-syair sederhana tapi memiliki makna kehidupan yang begitu mendalam.

Malam itu di Kampung Massaloeng Desa Salenrang, saya bertemu dan mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat di Kampung Massaloeng memainkan gambus, alat musik tradisional di rumah Inca Lanna (60 tahun). Hadir pula beberapa anak muda yang berdatangan membawa alat musik.

”Sudah empat malam kami latihan, karena anak muda disini masih malu-malu tampil di depan umum,” kata Inca diiringi tawa beberapa anak muda.

Selain latihan, para pemuda mendengarkan pengetahuan tradisi lisan dari para penuturnya yang rata-rata sudah berusia lanjut seperti Inca. Sambil mempersiapkan alatnya, Inca menceritakan kehadiran musik gambus di Kampung Massaloeng.

“Gambus ini kira-kira masuk tahun 1965. Yang perkenalkan itu gerombolan yang sering lewat sini (Massaloeng). Dulu, mereka tinggal di



salah satu kampung tua, Romang Lompoa. Dulu musik ini dimainkan dari malam sampai pagi. Menemani kami menjaga sawah. Di sini dulunya banyak babi yang merusak sawah-sawah. Makanya, kami mulai malam sampai pagi itu tidak tidur sambil bermain gambus,” jelasnya yang mengenal gambus sejak kecil.

Syair-syair yang biasanya mereka nyanyikan tiap malam saat menjaga sawah dari serbuan babi, berisikan pesan-pesan mengenai makna hidup, ajaran agama, dan juga interaksi mereka dengan gunung (karst), sungai, bahkan laut. “Lagu-lagunya tentang bagaimana kita menikmati hidup dan berhubungan dengan alam yang ada disini,” katanya.

Sambil diiringi petikan nada gambus, dia kemudian menyanyikan salah satu syair yang begitu terkenal di Rammang-Rammang, sekaligus mengandung pesan atau makna tentang kehidupan, kebersamaan, dan pentingnya menjaga kampung halaman.

*”Pariana Rammang-Rammang, ri Salenrang i allamba, ri Massaloeng i tarroe-roe i rappo’ na* (Tanaman pare Rammang-Rammang, di Salenrang menjalar, di Massaloeng buahnya

bergoyang-goyang),” kata Inca melantunkan potongan syair lagu.

Lagu yang dimainkan Inca itu berisi perumpamaan yang mendalam mengenai pertalian kehidupan di tiga perkampungan tua di desa ini yakni Rammang-Rammang, Salenrang, dan Massaloeng. Juga tentang penghidupan (manusia dan alam) dan identitas mereka sebagai keturunan Dampang Salenrang.

Khazanah bentang alam diikuti dengan tradisi lisan yang mengakar dan menjulang bagaikan hamparan gugusan karst Rammang-Rammang, juga membuat takjub anak muda penerus sekaligus pelestari tradisi lisan ‘*sinrilik*’ khas Makassar di Sulawesi Selatan, Arif Rahman Daeng Rate.

Arif, sapaan akrabnya, pernah berkunjung, berinteraksi, dan berbagi pengalaman secara langsung bersama dengan para penutur tradisi lisan di Rammang-Rammang. Dari interaksinya itu, Arif menyadari bahwa syair-syair yang mereka nyanyikan memiliki pesan yang kuat mengenai hubungan bentang alam dengan para penutur tradisi lisan di Rammang-Rammang.

“Kesenian mereka, baik lagu, syair, dan cerita yang berkembang disana mengarah pada satu hal, yakni pengabdian. Misalnya dalam lagu-lagu yang saya dengar ada yang menyebut sungai, gunung, dan beberapa kampung yang spesifik. Itu kan pada dasarnya ada yang mereka mau titipkan kepada generasi selanjutnya,” ucap Arif saat dihubungi via WhatsApp, pertengahan Maret lalu.



Inca Lanna sedang melantunkan syair dengan alat musik gambus kesayangannya. Foto: Nurul Fadli Gaffar/Mongabay Indonesia

Selain itu, para penutur tradisi lisan di Rammang-Rammang menyebutkan jika bentang alam di luar sana sudah banyak yang berubah, tetapi syair-syair lagunya masih ada dan begitu-pun sebaliknya. "Di Rammang-Rammang ini, semua masih terjaga. Bentang alamnya masih utuh dan penuturnya juga masih ada. Menurutku ini yang penting jadi titik temu antara tradisi lisan dan upaya pelestarian lingkungan," sambungnya.

Terakhir, saya menemukan sebuah pesan kuat di salah satu postingan Instagram Arif, sesaat setelah ia menikmati bentang alam dan berinteraksi langsung dengan para penutur tradisi lisan di Rammang-Rammang.

"Lirik yang tergubah dan kisah-kisah yang mengalir pada masyarakat ini muncul seperti bentang alam mereka. Semua lirik dan kisah adalah mereka sendiri. Bebatuan karst adalah mereka sendiri. Sungai adalah mereka sendiri. Tanah adalah mereka sendiri. Air adalah mereka sendiri. Adapun musik dan segala apa yang diiringinya adalah resonansi yang lahir dari bentang alam dan daya pikir/cipta manusia perawatnya. Terima kasih kepada kalian semua yang bertahan dengan sederhana dan ksatria." tulis Arif dalam postingan Instagramnya.

### ***Maudu Jolloro'*, Pesan Berbagi dan Bersyukur**

Akhir tahun 2016, sepanjang aliran Sungai Pute menyajikan lanskap alam yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun itu, di mulai dari dermaga satu menuju ke dermaga dua dipenuhi oleh perahu *jolloro'* yang membawa *Baku Maudu* atau sebuah ember yang berisi telur dan *songkolo*. Aktivitas masyarakat Desa Salenrang, khususnya Rammang-Rammang untuk merayakan Maulid Rasulullah SAW.

Sejak Rammang-Rammang ditetapkan sebagai kawasan wisata yang ramai dikunjungi, masyarakat kini mengenal dua cara merayakan tradisi Maulid Rasulullah SAW. Pertama ialah perayaan maulid yang sejak turun temurun dirayakan di masjid dan kedua ialah perayaan maulid yang diadakan di atas perahu atau dikenal dengan istilah *Maudu Jolloro'*.

Menurut Iwan Dento, Ketua Kelompok Sadar Wisata Hutan Batu Karst Rammang-Rammang menjelaskan *Maudu Jolloro'* yang diadakan pertama kali pada tahun 2016 itu merupakan upaya promosi wisata alam Rammang-Rammang dan sekaligus pelestarian tradisi.

"Sebenarnya tradisi *Maudu Jolloro'* itu, membawa konsep 'sedekah' ke para pengunjung



Suasana Kampung Berua, Rammang-Rammang pada malam hari. Foto: Nurul Fadli Gaffar/Mongabay Indonesia

sebagai ucapan terima kasih masyarakat di sini atas nikmat dan berkah yang mereka telah rasakan. Selain itu, tradisi ini juga sebagai ajang atraksi sekaligus pelestarian budaya atas limpahan sumber daya alam yang dimiliki Rammang-Rammang,” ujar Iwan Dento.

Perahu-perahu yang dihias dengan beragam ornamen khas maulid ini melintasi Sungai Pute dimulai dari Jembatan pute lalu berakhir di dermaga tiga Kampung Berua. Sesampainya di Kampung Berua, kegiatan dilanjutkan dengan *barasanji* oleh masyarakat dan juga diikuti para pengunjung.”Para pengunjung juga bisa bersama-sama naik di atas perahu merayakan kegiatan maulid di atas perahu khas Rammang Rammang ini,” tambahnya.

Saat perayaan *Maudu Jolloro'* yang dilaksanakan tahun 2018, Suratman Alimuddin, fotografer, yang kerap mengunjungi dan mempromosikan wisata Rammang-Rammang mengikuti kegiatan itu. Sebagai fotografer yang banyak mengabadikan pesona alam dan aktivitas budaya, Suratman menganggap bahwa tradisi ini sangat menarik untuk mengundang banyak wisatawan. Bahkan, ia juga melihat ada yang 'khas' dalam tradisi *Maudu Jolloro'*

yang diadakan oleh masyarakat di Rammang-Rammang.

“*Maudu Jolloro'* di Rammang-Rammang ini mirip dengan perayaan *Maudu Lompoa* di Cikoang, Takalar. Tapi kalau di sana (Cikoang) perahunya besar dan ditampilkan di kampung. Di Rammang-Rammang ini, menariknya karena melintasi sungai. Ini yang banyak disukai sama wisatawan,” jelasnya.

Tradisi *Maudu Jolloro'* di Rammang-Rammang terakhir diadakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, kegiatan ini tidak dilakukan akibat pandemi dan aktivitas wisata terhenti sementara. Meskipun sudah dua tahun tidak diadakan, Suratman berharap agar kegiatan *Maudu Jolloro'* di Rammang-Rammang dapat kembali diadakan, sebab menurutnya kegiatan ini memiliki keunikan tersendiri bagi para penikmat atraksi budaya seperti dirinya. (Selesai)

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Para penulis: **Slamet Riadi (Memet)**, Alumni magister Antropologi UGM Yogyakarta merupakan peneliti kajian antropologi ekologi dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. **Nurul Fadli Gaffar**, Fotografer lepas di Sulawesi Selatan.

Tulisan ini merupakan seri liputan Rammang-Rammang yang didukung oleh Mongabay Indonesia.

Sumber: <https://www.mongabay.co.id/2022/07/09/menikmati-pesona-bentang-alam-berbalut-budaya-rammang-rammang/>



# No Child Left Behind

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

Foto: Andri M., Safrizal/Vayasan BaKTI



etiap tanggal 23 Juli kita memperingati hari anak nasional. Tahun ini tema hari anak nasional Indonesia adalah 'Anak terlindungi, Indonesia Maju'. Saat berbicara tentang pembangunan untuk anak Indonesia, sejatinya kita membicarakan semua anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sejauh mana pembangunan sudah memenuhi hak anak berkebutuhan khusus terkait pendidikan, kesehatan, lingkungan yang aman dan nyaman?

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) meningkat tiap tahunnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkirakan hampir 70 persen anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia adalah sebanyak 1,6 juta orang. Artinya, satu juta lebih ABK belum memperoleh pendidikan yang penting bagi kehidupannya.

Dari 30 persen ABK yang sudah memperoleh pendidikan, hanya 18% di antaranya yang menerima pendidikan inklusi, baik dari sekolah luar biasa (SLB), maupun sekolah biasa pelaksana pendidikan inklusi. Rendahnya jumlah ABK yang memperoleh pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus, dan juga stigma masyarakat terhadap ABK.

Sulawesi Selatan sendiri sudah memiliki undang-undang yang menegaskan agar semua sekolah memperhatikan isu ABK. Peraturan tentang pendidikan inklusi tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas.

Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya, dan lainnya.

Dalam hal pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan yang bersifat inklusif sangat penting agar mereka bisa berbaur dan secara perlahan mandiri di dalam lingkungannya. Dan sebaliknya, masyarakat juga bisa menerima dan bersikap wajar kepada mereka yang spesial.

Dalam sebuah artikel yang dimuat Kompas.com, Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Usman Basuni mengatakan, pendidikan orang tua menjadi salah satu kendala besar dalam melindungi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia mengatakan, di Indonesia mayoritas pendidikan orangtua yang memiliki anak berkebutuhan khusus adalah tidak tamat SD. Kendala lainnya adalah terkait rasa malu orang tua jika diketahui memiliki anak berkebutuhan khusus serta keterbatasan ekonomi.

Di Makassar terdapat sebuah komunitas yang fokus pada pendampingan dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, namanya adalah Klub Belajar Sipatokkong (KBS). Sipatokkong dalam bahasa Bugis berarti saling menguatkan. Diharapkan individu dalam KBS dapat saling dukung, saling menguatkan sehingga anak-anak dapat tetap tertangani. KBS didirikan pada 12 Desember 2016. Klub Belajar Sipatokkong adalah komunitas yang fokus mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus dari keluarga pra sejahtera, termasuk juga mengedukasi orang tua dengan memberikan pelatihan untuk penanganan terapi ataupun penanganan stimulasi kepada ABK.

Komunitas ini terdiri dari orang-orang yang memiliki keinginan, minat, serta ketertarikan yang sama, yaitu memberikan pendampingan, terapi, edukasi, serta penguatan kepada ABK yang berasal dari Keluarga Prasejahtera.

Dalam obrolan bersama Pembina Klub Belajar Sipatokkong, Ibu Zaenab Pontoh, S.Psi., M.Psi ia menjelaskan bahwa ABK adalah Anak Berkebutuhan Khusus yang membutuhkan penanganan khusus pula. Dalam konteks pendidikan biasanya diistilahkan dengan peserta

didik berkebutuhan khusus, yang sedikit berbeda dari anak-anak regular lain.

Ada dua kategori anak berkebutuhan khusus berdasarkan faktor penyebabnya yakni internal dan eksternal. Faktor internal terkait dengan disabilitasnya atau terkait dengan keunggulannya. “Kalau disabilitas yang terkait dengan internal sering kita dengar dengan istilah ketunaannya, ada tuna netra, tuna rungu, tuna daksa sampai dengan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, itu masuk dalam *exceptional children*” ungkap ibu Zaenab Pontoh. Begitu juga anak spesial atau anak berkebutuhan khusus karena keunggulannya, seringkali karena intelegensinya atau karena bakatnya.

Anak-anak yang mempunyai bakat di atas rata-rata melebihi anak seusianya juga termasuk ke dalam kelompok anak-anak berkebutuhan khusus. Untuk ABK karena faktor eksternal, biasanya sifatnya temporer-tidak permanen. Contoh ABK karena faktor eksternal seperti anak dari keluarga terlantar, korban konflik bencana, korban konflik sosial, bahkan terbelakang karena geografis juga masuk dalam ranah peserta didik berkebutuhan khusus.

### **Keluarga Prasejahtera**

Keluarga prasejahtera menjadi fokus utama dampingan KBS, walaupun diketahui banyak di luar sana anak-anak berkebutuhan khusus yang juga butuh penanganan. KBS fokus pada anak berkebutuhan khusus prasejahtera karena berdasarkan hasil observasi, keluarga prasejahtera tidak tersentuh layanan klinik tumbuh kembang atau sejenisnya sehingga hal-hal terkait penanganan disabilitas atau kekhususannya pun tidak tertangani.

Keluarga prasejahtera umumnya lebih memprioritaskan kesejahteraan sehari-hari keluarga ketimbang memberikan anak *treatment* atau terapi khusus. Selain itu hal ini juga terkait minimnya informasi orangtua keluarga prasejahtera berkaitan penanganan ABK yang disebabkan karena rendahnya pengetahuan mereka.

### **Berkerja Bersama Relawan**

Berangkat dari semangat memberikan penjangkauan dan dampingan kepada keluarga

ABK prasejahtera, mendasari pemikiran untuk merangkul relawan dari berbagai kalangan dan profesi. Relawan ada yang *basic skill*-nya pendidikan, kesehatan, dll. Tidak ada disiplin ilmu spesifik asalkan mereka bersedia berkontribusi, berkomitmen bersama-sama menangani anak berkebutuhan khusus.

Para relawan ini dilatih dan disiapkan untuk dapat memberikan penanganan dasar bagi ABK dengan menggunakan metode ABA (*Applied Behavior Analysis*). ABA adalah salah satu pendekatan terapi yang diberikan kepada anak ASD (*Autism Spectrum Disorder*) dan ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*). Program ABA diberikan sesuai kebutuhan, tapi tidak hanya ABA, tidak hanya mendampingi anak autisme, KBS juga mendampingi anak yang membutuhkan pendampingan dari sisi fisioterapi.

Pelatihan Tata Laksana Penanganan Dasar ABK dan Seminar Komunikasi Pada Anak Berkebutuhan Khusus, juga dilaksanakan KBS dengan menghadirkan konsultan yang sudah berpengalaman belasan tahun untuk menangani ABK.

Relawan KBS memberikan pendampingan bagi ABK di Klub Bermain dan TK Kharisma di jalan Baji Ateka, Makassar dan juga kunjungan ke rumah ABK. Saat ini jumlah relawan yang bergabung dalam KBS sebanyak 26 orang. Sementara jumlah anak dampingan yang ditangani berjumlah 11 orang dari 9 keluarga yang berdomisili di beberapa wilayah di Kota Makassar.

Klub Belajar Sipatokkong berupaya terus merangkul para relawan karena diyakini semakin banyak kalangan yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk ABK, akan memberi efek kesembuhan yang lebih besar.

Dalam enam tahun perjalanannya, tentunya KBS menghadapi tantangan. Tantangan yang dihadapi selama ini adalah terkait komitmen relawan, pun dengan komitmen dari keluarga dampingan sendiri. Dalam prosesnya yang menjadi fokus utama KBS adalah keberhasilan dalam proses pendampingan. Harapannya, keluarga dampingan tidak tergantung kepada relawan. KBS mengupayakan agar keluarga yang didampingi dalam periode tertentu secara mandiri dapat mendampingi anak ABK masing-masing.

Keberadaan relawan sifatnya sementara. Setiap relawan yang telah mengikuti pelatihan wajib memberikan pendampingan selama enam bulan, setelah itu relawan bisa melepaskan kerelawannya atau dapat memilih untuk tetap memberikan dampingan. Dalam seminggu relawan diminta menyisihkan waktu selama minimal dua jam. Jika kebutuhan belajar ABK dalam seminggu lebih dari dua jam maka waktu akan disesuaikan dengan relawan lain.

Tantangan dari sisi keluarga, khususnya dari keluarga prasejahtera adalah mereka masih fokus pada kebutuhan ekonomi dan aktivitasnya sementara proses pendampingan ABK butuh waktu dan komitmen yang berkelanjutan. Pendampingan di tahap awal dilakukan oleh relawan. Relawan mengedukasi orang tua atau siapa saja dari pihak keluarga. Lebih awal didampingi akan lebih baik karena makin besar usia anak, maka semakin sulit untuk diintervensi. Proses pendampingan sangat bergantung pula dengan waktu sehingga komitmen relawan dan orang tua ABK sangat diharapkan.

### Kegiatan KBS

Kegiatan inti dari KBS adalah memberikan pendampingan, tapi disamping itu juga dilakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti *outing* ke tempat-tempat yang sifatnya edukatif, memperingati hari-hari besar nasional, buka puasa bersama saat Ramadhan, dan juga bermain bersama yang dilaksanakan sebulan sekali. Bermain bersama bukan hanya untuk anak dampingan, namun juga memberi akses kepada anak ABK lain. Bermain bersama ini berguna untuk menstimulasi anak, mengasah kecakapan sosial karena tentunya anak harus dikenalkan dengan lingkungan sosial lain.

### Perubahan yang terjadi

Setiap perubahan yang terjadi sekecil apapun pada setiap anak dampingan menjadi sebuah kesyukuran bagi KBS dan orang tua. Hal yang membanggakan adalah ketika proses pendampingan, anak-anak sudah bisa mengembangkan *social skill*, paham bagaimana berperilaku, bagaimana cara mengendalikan emosi serta sudah bisa melakukan instruksi walaupun instruksinya sederhana.

Perubahan lain juga terlihat dari sisi orang tua, orang tua yang sebelumnya tertutup sudah tereduksi dengan sendirinya dengan melihat adanya *progress* yang didapat dari anak, misalnya anak sudah bisa duduk manis dan lainnya. Satu hal yang juga membanggakan dan tidak kalah pentingnya adalah semakin banyak yang terpanggil untuk menjadi relawan dan banyak komunitas-komunitas yang terpanggil untuk membantu.

KBS terbuka untuk berkolaborasi dengan organisasi. KBS berharap semakin banyak pihak-pihak yang mau mendukung aktivitas-aktivitasnya baik secara moril maupun spiritual. KBS berharap dapat mandiri selaku organisasi, sehingga lebih banyak ABK yang akan mendapatkan pelayanan.

Mimpi terbesar KBS adalah tidak ada lagi pemisah antara anak dan anak berkebutuhan khusus. Harapannya makin banyak sekolah inklusi yang betul-betul menerima anak-anak ABK.

“Kalau kita percaya bahwa tidak ada hal yang kebetulan, maka keberadaan ABK di sekeliling kita pun bukan kebetulan entah kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai relawan, atau sebagai siapa saja karena ada anak ABK di sekitar kita maka ada maksud tertentu sang pencipta tentang keberadaan mereka” ungkap ibu Zaenab Pontoh menutup obrolan kami.

Salah satu tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Harapannya tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam semua sektor pembangunan di Indonesia terlebih soal pendidikan.

### INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk memperoleh Informasi lebih jauh mengenai inisiatif ini dapat menghubungi:

**Zaenab Pontoh, S.Psi., M.Psi**

Pembina Yayasan KBS (Klub Belajar Sipatokkong)

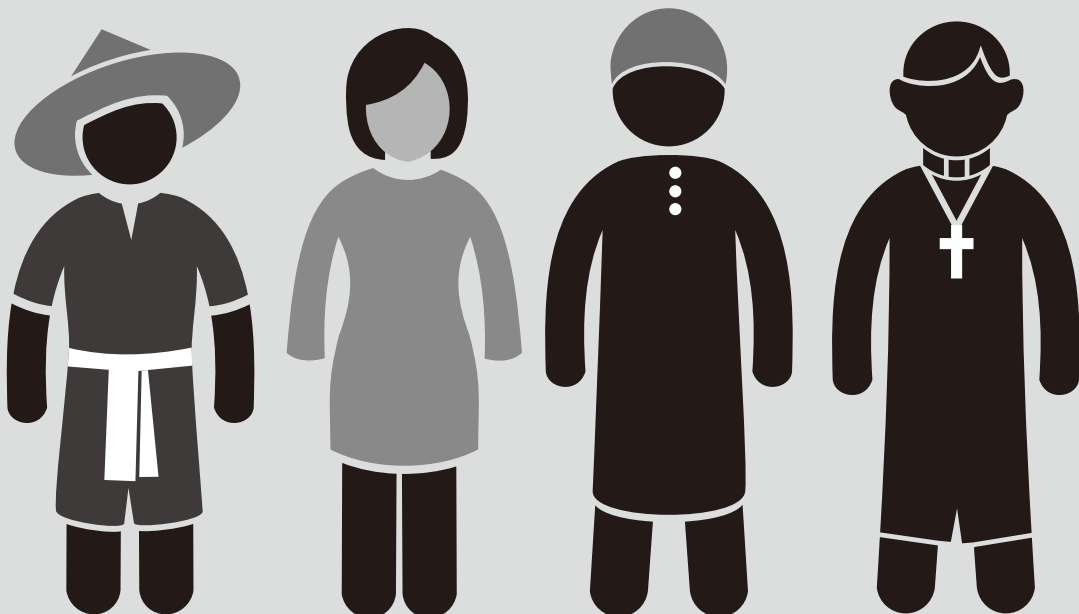
Email: [olapontoh123@gmail.com](mailto:olapontoh123@gmail.com)

# MERAWAT TOLERANSI DENGAN *PEACEPRENEURSHIP*

Oleh **ITA IBNU**

**I**ndonesia dikaruniai dengan keberagaman suku, ras, adat, bahasa, budaya, keyakinan, dan antar golongan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati dan menghargai pihak lain, baik pemikiran, gagasan, maupun kepercayaan yang dimiliki kelompok atau individu. Kurang memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sikap intoleransi yang tak jarang memicu konflik.





Selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan beberapa insiden terkait terorisme dan radikalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir, tren yang mengkhawatirkan dari penyebaran opini radikal di kalangan anak muda telah muncul. Sebuah jajak pendapat tahun 2018 oleh Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) Negeri Syarif Hidayatullah, yang mencakup 2.181 siswa dan guru, menemukan bahwa 58,5% responden mahasiswa universitas dan sekolah menengah memiliki pandangan agama radikal.

Salah satu penyebab selain kurangnya pemahaman tentang keberagaman, masalah ekonomi juga dapat berkontribusi pada menjamurnya paham radikal di kalangan anak muda. Banyak anak muda yang menganggur, membuat mereka menjadi sasaran empuk kelompok radikal.

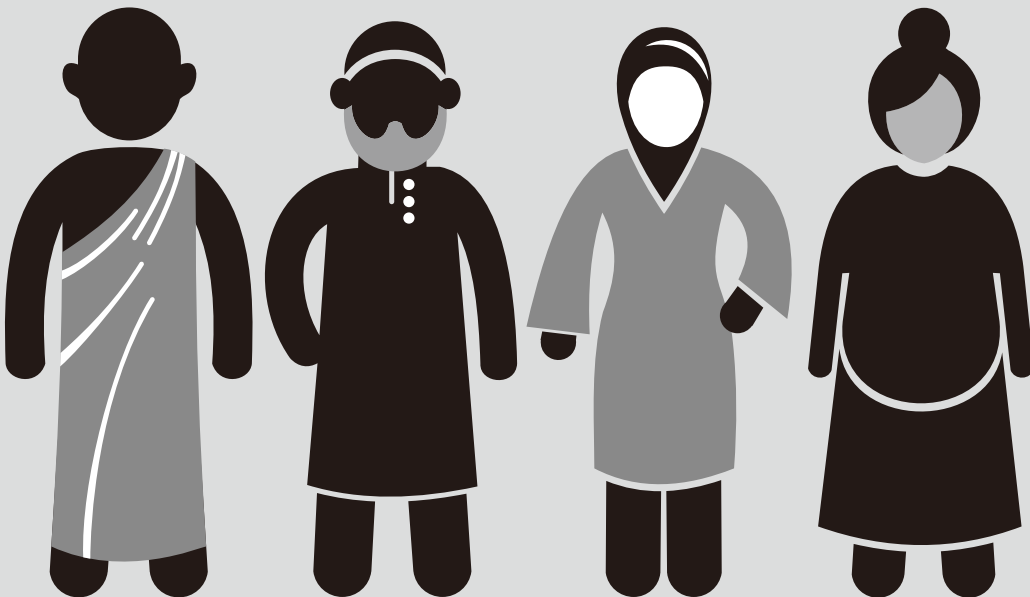
Ini pula yang mendorong Kristi Praptiwi (Lulusan S2 *Development Studies*, Universitas Melbourne, Australia) bersama dengan Aliansi Kerukunan Antar-Pemuda Lintas Agama (AKAPELA) di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan LBH APIK Lombok menggagas '*Peacepreneurship*' untuk Memerangi Intoleransi Pemuda. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi radikalisasi pemuda dengan meningkatkan kemampuan dan

pemahaman peserta tentang pembangunan perdamaian melalui usaha kecil. Sehingga, para peserta berpotensi meningkatkan pendapatan mereka dan sekaligus menurunkan tingkat pengangguran di Lombok, daerah yang sering menjadi saksi ketegangan antaragama.

Kristi yang sejak tahun 2008 berkiprah dalam dunia pembangunan di KTI, melihat ada banyak potensi yang dimiliki oleh pemuda di Lombok. Namun karena keterbatasan akses, kurangnya pemahaman mereka tentang keberagaman, kurangnya ruang untuk dialog antar umat beragama, bahkan tak jarang konflik muncul dipicu oleh hal-hal sederhana dan berakibat trauma.

### **Cinta Tuhan, Cinta Manusia dan Cinta Alam di *Peacepreneurship***

Aktivitas pertama kali yang dilakukan adalah berdialog dengan pemuda lintas agama dan penganut kepercayaan. Karena tak jarang konflik muncul karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman. Tujuan utama dari dialog selain untuk membangun pemahaman juga untuk mencapai kemajuan bersama. Dalam pelaksanaannya pula, melibatkan pemimpin agama yang progresif, yang memiliki pemahaman tentang pentingnya *peacebuilding*.



Setelah pemahaman pemuda terbangun lewat dialog, kemudian dilanjutkan dengan program-program lainnya yang mempertemukan pemuda tersebut dalam satu wadah, di antaranya adalah *Peacepreneurship*. Mengapa kewirausahaan? Pemuda yang baru saja lulus sekolah atau kuliah, biasanya mereka gelisah mencari pekerjaan. Padahal di daerah mereka memiliki begitu banyak potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan dikelola sebagai sumber penghasilan.

Pemuda lintas agama dan para penganut kepercayaan kemudian kembali berdialog, mencari solusi apa yang dapat dilakukan dengan mengelola potensi sumber daya alam dan kegelisahan mereka dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah yang semakin memprihatinkan ditambah dengan Lombok sebagai salah satu destinasi wisata.

Sehingga lahirlah *Peacepreneurship*, yang merupakan gabungan *peacebuilding* dan *entrepreneurship*, atau dengan kata lain kombinasi kegiatan kewirausahaan sosial dan pembangunan perdamaian dalam mencari solusi untuk menumbuhkan toleransi dan kerukunan antaragama di kalangan anak muda. *Peacepreneurship* mempertemukan anggota kelompok pemuda, untuk berkolaborasi dalam kampanye harmoni sosial melalui usaha kecil yang dipimpin oleh pemuda.

Melalui wadah ini, pemuda menciptakan usaha bersama dengan tujuan yang bukan hanya membangun kerukunan antar umat beragama dan penganut keyakinan, namun juga kerukunan antar manusia dengan lingkungan/alam. Sementara kegiatan *peacebuilding* biasanya hanya melibatkan diskusi peningkatan kesadaran, *peacepreneurship* mengharuskan pemuda untuk berinteraksi dengan orang lain dari latar belakang agama yang berbeda, misalnya untuk pendampingan usaha kecil.

Dengan menggunakan pendekatan yang partisipatif, *peacepreneurship* lahir dari aspirasi para pemuda yang sedang gelisah mencari pekerjaan, di sisi lain mereka juga menginginkan

usaha yang berkelanjutan yang sejalan dengan penyelamatan lingkungan. Walaupun dalam proses berdialog dan menyuarakan ide dan aspirasi sering terjadi bentrok. Namun seiring waktu peserta belajar menemukan resolusi konflik.

Pada tahun 2018, Kristi Praptiwi kemudian memperoleh *Alumni Grant Scheme* dari *Australia Awards Indonesia*. Kristi kemudian bersama AKAPELA dan Lembaga Bantuan Hukum Persatuan Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Nusa Tenggara Barat, bersama dengan pemuda yang telah didampingi menjalankan *peacepreneurship*.

Proyek ini berlangsung dari Oktober 2018 hingga Desember 2019 dan terdiri dari tiga langkah. Pertama, serangkaian sesi pelatihan dan pendampingan memperkenalkan konsep *sociopreneurship* kepada 112 anak muda. *Sociopreneurship* dijelaskan sebagai bisnis yang tidak semata-mata fokus pada profit, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Bekerja sama dengan anak muda yang memiliki wirausaha sosial di Lombok untuk melakukan mentoring kepada peserta mulai dari membuat rencana bisnis, berjejaring hingga membaca pangsa pasar.

“Ternyata ada banyak anak muda yang memiliki usaha sosial di Lombok dan mereka kami minta melakukan mentoring ke anak muda yang menjadi peserta *peacepreneurship* ini,” jelas Kristi.

Setelah pelatihan dan pendampingan selesai, para peserta dibagi menjadi dua kelompok di mana kedua kelompok ini berfokus pada lingkungan. Kelompok pertama berkonsentrasi pada pertanian organik bekerja sama dengan petani lokal seperti petani Lombok, teh *mint*. Sedangkan kelompok kedua mendirikan usaha yang mendukung *Zero Waste*, seperti pembuatan souvenir untuk mempromosikan kerja sama antaragama seperti pembuatan *tottee bag*, daur ulang botol kaca, bekerja sama dengan pengrajin *bamboo* untuk sedotan bambu.

Setelah bisnis mereka berjalan, para peserta mengunjungi sekolah menengah terpilih untuk berbicara tentang pengetahuan *peacepreneurship*, potensi ekonomi di Lombok, dan ide bisnis mereka, tujuannya untuk menyebarkan semangat kepada anak muda dan sekaligus membuka peluang kolaborasi dengan pihak sekolah, bahkan beberapa sekolah termasuk pesantren tertarik untuk mereplikasi *peacepreneurship*. Selain itu, juga berjejaring dengan pemerintah, peserta kemudian difasilitasi untuk ikut serta dalam berbagai pameran yang digelar pemerintah daerah.

Walaupun dukungan dari AGS telah selesai, namun beberapa peserta masih melanjutkan aktivitas *peacepreneurship*, ada yang bekerja sama dengan karang taruna untuk membuat kerajinan dari botol bekas, menggerakkan petani di desa untuk menanam cabai organik dan membuat bubuk cabai kering khas Lombok tanpa MSG. Sedangkan peserta yang masih kuliah, aktif menjalankan gerakan mengurangi sampah plastik bersama.

Ketika proyek selesai, banyak peserta mendirikan usaha di desa mereka untuk mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan pesan kerukunan antaragama sehingga pesan utama yang digaungkan *peacepreneurship* yaitu Cinta Tuhan, Cinta Manusia dan Cinta Lingkungan dapat terwujud.

### Melahirkan Lebih Banyak Pemimpin Perempuan

Melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan rupanya masih menjadi tantangan di Lombok. Inilah salah satu target *peacepreneurship*, bagaimana mendorong partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam bisnis dan kampanye sosial, dengan target 60% penerima manfaat perempuan. Selama pelaksanaan *peacepreneurship* ini, bakat dan kepemimpinan perempuan muda berkembang. Berdasarkan evaluasi proyek (menggunakan survei kecil, FGD, dan metode wawancara) yang dilakukan dengan tiga belas pemuda *champion*

(tujuh perempuan dan enam laki-laki), mereka setuju bahwa kegiatan proyek meningkatkan pengetahuan dan kepemimpinan mereka. Selain itu, ketujuh remaja putri juara merasa kepemimpinan mereka meningkat dan didukung oleh rekan-rekan pria mereka, teman-temannya pun mendukung kepemimpinan perempuan dalam kelompok mereka. Widiya dan Yuni adalah dua contohnya.

“Setelah saya terlibat dalam *Peacepreneurship*, saya mulai memahami kewirausahaan sosial. Saya bergabung dengan komunitas dan mengambil peran dalam kelompok sebagai Koordinator Kontrol Kualitas. Banyak hal yang saya pelajari selama pelaksanaan proyek, dari hal yang paling sederhana hingga yang paling rumit, misalnya mengelola anggota kelompok (kebanyakan laki-laki), membangun hubungan yang sehat dalam kelompok, berjejaring dengan pemerintah daerah, sekolah, dan kelompok perempuan, serta memfasilitasi sesama perempuan untuk lebih berdaya,” kata Yuni.

Sebagai milenial, Widiya dan Yuni terpelajar dan percaya diri. Mereka diberdayakan. Namun, sebagai perempuan, mereka seringkali tidak memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka di depan umum dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka, terutama dalam masyarakat yang konservatif. *Peacepreneurship* adalah cara yang memungkinkan mereka menjadi pemimpin melalui partisipasi aktif, hubungan dan komunikasi yang sehat, jaringan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah.

*Peacepreneurship* menjadi salah satu upaya untuk melahirkan dan membangun generasi yang sehat, generasi yang mengutamakan *peacebuilding* sehingga Indonesia yang damai dan maju dapat terwujud.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Info lengkap tentang inisiatif ini, kunjungi kanal YouTube BaKTI Foundation



# KRISIS IKLIM DALAM AGENDA POLITIK ELEKTORAL 2024

Oleh  
**SHOLAHUDIN AL AYUBI & AGUNG BUDIONO**

Ilustrasi: Freepick.com

**M**

enguatnya isu krisis iklim yang disuarakan kaum muda di berbagai belahan dunia mengingatkan kita pada sosok paling berpengaruh “2019 Person of the Year” versi majalah Time, Greta Thunberg. Sebagai aktivis muda, konsistensi Greta dalam menyuarakan isu krisis iklim sejak tahun 2018 terbukti tidak hanya menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia, melainkan juga telah memaksa perubahan sistem dan kebijakan pemerintah dan parlemen soal isu iklim di berbagai negara. Keberhasilan itu terjadi karena narasi yang dibawanya mampu melampaui spektrum ideologi politik manapun di dunia. Ini membuat apa yang dikatakannya tidak mudah terjebak pada perdebatan umum partai politik yang kerap terjadi pada momen-momen elektoral. Lantas, bagaimana isu iklim jika dikaitkan dengan agenda politik elektoral di Indonesia? Hasil survei nasional perubahan iklim oleh Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah pada Oktober 2021, mengungkapkan temuan yang relevan mengenai cerminan aspirasi anak muda Indonesia yang akan berpartisipasi dalam pemilu 2024 mendatang. Survei yang menyoal anak muda usia 17-35 tahun ini menunjukkan anak muda kian menaruh perhatian serius pada persoalan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Sebanyak 4 dari 5 responden menilai pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi krisis iklim karena dampaknya yang kian dirasakan. Bahkan, langkah tersebut juga mereka yakini perlu dilakukan meskipun akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

*Advertisement* Aspirasi kaum muda penting diperhatikan mengingat Gen Z dan Milenial ini akan berperan sebagai pemilih muda dan pemula Indonesia. Jumlahnya lebih dari 80 juta atau sekitar 40% dari total pemilih pada pemilu 2024. Sebagaimana diketahui, jadwal pemilu 2024 yang sudah disahkan kemungkinan besar akan mulai memanaskan mesin elektoral mulai pertengahan tahun ini. Masing-masing partai kini sudah tampak menyusun berbagai strategi dan manuver untuk nantinya bisa memenangkan suara rakyat. Dalam konteks ini, preferensi kaum muda sebagai pemilih mayoritas akan menjadi bagian penting yang kelak menentukan kandidat dan partai politik seperti apa yang diinginkan kaum muda.

Bencana Hidrometeorologi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) baru-baru ini merilis laporan bencana sepanjang tahun 2022. Per Juli 2022, jumlah kejadian bencana di Indonesia yang telah terjadi sebanyak 2.118. Angka ini lebih banyak dari rata-rata kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun 2007-2015. Selain itu, sejak tahun 2010, hampir seluruh bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi. Ini merupakan bencana yang disebabkan oleh kondisi cuaca dan iklim serta kerusakan lingkungan yang masif, seperti banjir, tanah longsor dan puting beliung. Secara rata-rata kerugian ekonomi yang dialami karena bencana hidrometeorologi setiap tahunnya sebesar 22,8 triliun rupiah. BNPB mendorong para pihak terutama pemerintah untuk melihat kembali kondisi alam dan lingkungan sekitar dan segera membenahi sumber kerusakannya. Sejalan dengan arahan tersebut, kesadaran serupa juga yang kini diserukan oleh masyarakat



Bencana hidrometeorologi adalah bentuk bencana yang paling terbesar terjadi di Indonesia. Bencana akibat kondisi cuaca dan iklim serta kerusakan lingkungan yang masif ini setiap tahunnya menimbulkan kerugian mencapai 22,8 triliun rupiah, Bappenas memproyeksikan angka kerugian ini akan meningkat berkali lipat ditahun 2020 hingga 2024. Foto: **Erry An Erryanz/Flickr.com**

di seluruh dunia. Seperti jajak pendapat tentang perubahan iklim 2022 yang dilakukan oleh Meta, perusahaan digital teranyar milik Mark Zuckerberg, mengungkapkan kecenderungan masyarakat pengguna internet di seluruh dunia mengenai kekhawatirannya pada risiko perubahan iklim dan meminta pertanggungjawaban besar dari pemerintah setempat. Namun di Indonesia, perhatian partai politik sebagai motor pemerintahan terhadap perubahan iklim masih terbilang minim.

Dilihat dari visi misi dan program kerja, mayoritas partai politik saat ini belum menunjukkan prioritas perhatian dalam mengatasi krisis iklim. Paling umum, wacana yang kerap disampaikan elit partai dalam merespons isu kerusakan lingkungan hanya

dijawab dengan agenda menanam pohon, seolah melupakan penyebab utama dari kerusakan yang terjadi. Sejak reformasi, corak partai politik di Indonesia memang masih berfokus mengangkat isu dasar, seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan korupsi. Terlepas dari urgensi ketiga isu tersebut dan lanskap politik yang berbeda, apa yang terjadi di belahan Eropa, misalnya, partai-partai politik umumnya memiliki keseriusan dalam menjadikan isu-isu perubahan iklim, lingkungan dan ekonomi hijau sebagai agenda politiknya. Sehingga tak jarang dari mereka yang menyebut partainya sebagai ‘partai hijau’.

Gap yang besar antara kesadaran pemilih muda dengan tingkat perhatian partai politik di Indonesia terhadap krisis iklim ini menunjukkan

ada jarak yang demikian jauh antara konstituen dengan para elit politiknya. Sementara, krisis iklim cepat atau lambat akan semakin memaksa kita untuk melakukan langkah yang berani, karena dampaknya yang akan merugikan seluruh pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini, Bappenas sudah memproyeksikan kerugian ekonomi akibat dampak perubahan iklim yang mencapai 544 triliun rupiah pada 2020-2024. Sebuah angka fantastis untuk negara yang saat ini fokus pada agenda pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Sayangnya, Pemerintah Indonesia hingga saat ini juga belum menunjukkan langkah ambisius dalam mitigasi perubahan iklim. Hal ini bisa dilihat terutama dari sektor energi, di mana ketergantungan negara terhadap pemanfaatan sumber energi fosil seperti batu bara yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar dari sektor energi masih terus dilakukan meski sejumlah pihak telah mengungkapkan berbagai konsekuensinya baik dari sisi sosial, lingkungan, hingga nilai ekonominya.

Dalam hal ini, realisasi kebijakan transisi energi melalui peningkatan bauran energi terbarukan yang sejak tahun 2015 digaungkan pada kenyataannya masih mengalami banyak tantangan untuk mencapai targetnya. Sementara di sisi lain, kebijakan pembatasan produksi batubara nasional yang diharapkan secara gradual dapat menurun, justru dalam pelaksanaannya terus menerus ditingkatkan. Kedua persoalan ini, tentunya tidak hanya akan mengarah pada kelangkaan ketersediaan sumber daya alam, melainkan juga mendorong percepatan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan hutan. Narasi Iklim Partai Politik Sejumlah persoalan di atas akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para kandidat Calon Presiden (Capres) dan partai politik di Indonesia.

Peserta Pemilu 2024 bisa mengangkat narasi krisis iklim mengingat makin sadarnya anak-anak muda terhadap isu ini. Hal itu juga tidak lepas dari tren kesadaran global masyarakat terhadap

agenda 'politik hijau' yang semakin meningkat, sehingga bisa diperkirakan hal serupa juga akan menjadi diskursus yang tidak hanya mewarnai, melainkan juga akan menentukan siapa yang pantas mendapat insentif elektoral berupa suara pemilih. Para kandidat dan partai politik seharusnya mulai dari sekarang perlu serius mengusung pandangan politiknya terhadap percepatan agenda transisi energi yang berkeadilan dan pengembangan ekonomi hijau yang bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mencegah krisis iklim.

Langkah politik seperti ini terbukti berhasil mendongkrak suara Partai Hijau pada Pemilu Jerman tahun 2021 lalu, dengan mencetak sejarah perolehan suara tertinggi sebesar 15 persen. Partai yang mengusung agenda keberlanjutan lingkungan hidup dengan menasar pemilih muda ini berhasil mendapat lebih dari dua kali lipat lebih banyak suara dibandingkan perolehan mereka pada tahun 2013. Selama ini, kita didoktrin bahwa aspek lingkungan seolah hanya menjadi salah satu aspek yang berdiri di antara aspek-aspek pembicaraan lain kita seputar sosial dan ekonomi.

Sehingga, kebijakan mengenai lingkungan hidup seringkali dibenturkan atau dikesampingkan begitu saja ketika hendak memprioritaskan kebijakan ekonomi dan masyarakat. Kekeliruan besar ini perlu kita akhiri segera, dengan melihat lingkungan hidup sebagai lingkaran besar yang justru melatarbelakangi segenap masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi. Kesadaran baru ini yang juga penting kita letakkan pada agenda politik elektoral mendatang, karena dengan melihat dampak dari krisis iklim hari ini, Pemilu 2024 bisa jadi merupakan penentu kita dalam menghadapi nasib keberlanjutan ekologis dan masa depan sosial-ekonomi Indonesia.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/62e74952601ad/krisis-iklim-dalam-agenda-politik-elektoral-2024>

# Dua Tahun Pandemi: Refleksi Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Oleh  
**FUJI AOTARI & LAMIA PUTRI DAMAYANTI**







ampir dua tahun Indonesia menyusuri jalan panjang pandemi COVID-19. Sejak kasus pertama COVID-19 ditemukan di Indonesia pada 2 Maret 2020, wabah ini telah memaksa pemerintah mengubah rencana pembangunan yang telah disusun. Dalam kondisi ini, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan yang hebat untuk menghadirkan kebijakan penanganan pandemi yang cepat sekaligus tepat. Sayangnya, terdapat banyak tantangan dalam mewujudkan kebijakan yang komprehensif dan berlandaskan ketepatan data. Hal ini khususnya tercermin pada respons kebijakan pandemi COVID-19 yang berorientasi *top-down* (berasal dari atas/pemerintah pusat untuk kemudian dijalankan oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas), belum terkoordinasi lintas sektor dan terhubung dengan masyarakat.

Bagaimana perjalanan respons kebijakan Indonesia secara garis besar selama pandemi? Apa yang bisa diperbaiki guna meningkatkan ketahanan dan kegesitan Indonesia dalam menghadapi situasi genting serupa pandemi di masa yang akan datang?

### **Respons Kebijakan Pandemi yang Terkotak-Kotak di Indonesia**

Penanganan pandemi yang dijalankan pemerintah Indonesia cenderung sektoral, seakan mengontraskan kebutuhan pemulihan sektor kesehatan dengan sektor ekonomi. Terdapat tarik-menarik tujuan utama penanganan pandemi COVID-19, tercermin pada keputusan pemerintah yang mengganti-ganti bidang dan penanggung jawab penanganan pandemi.

Di masa awal pandemi, tepatnya sebelas hari sejak kasus pertama positif COVID-19 ditemukan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagai dasar dari pembentukan Gugus Tugas sebagai penanggung jawab penanganan pandemi nasional. Gugus Tugas ini dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Lalu, pada Juli 2020, melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020, mandat Gugus Tugas diintegrasikan ke dalam Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang diketuai oleh Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto. Perubahan ini didasari oleh penambahan satuan yang berfokus pada pemulihan ekonomi nasional. Melalui integrasi ini, Gugus Tugas bertransformasi menjadi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19, salah satu bagian dalam KPC-PEN yang bertugas melakukan implementasi penanganan COVID-19.

Selanjutnya, perubahan komando juga kembali dilakukan ketika terjadi lonjakan kasus pada Juli 2021. Kala itu, Presiden menunjuk Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali. Di saat bersamaan, Luhut juga menjabat sebagai Wakil Ketua KPC-PEN yang terlibat aktif dalam penentuan kebijakan pembatasan sosial selama pandemi di Indonesia.

Penanganan pandemi bersifat sektoral yang hanya melibatkan lembaga lembaga tertentu berdampak pada pergantian komando yang membingungkan koordinasi antar lembaga. Kebingungan ini antara lain disebabkan oleh komposisi komando yang beririsan dengan kabinet pemerintahan. Di masa awal pandemi, pelibatan para ahli kesehatan seperti epidemiolog dalam pergantian komando juga terbilang rendah, sehingga pendekatan penanganan pandemi minim perspektif keilmuan medis. Tidak hanya itu, pergantian komando tersebut juga memunculkan perubahan-perubahan kebijakan yang menyulitkan penyesuaian.

### **Kewajiban Masyarakat Melakukan 3M VS Kewajiban Pemerintah Melaksanakan 3T**

Jika ditelaah lebih jauh, penanganan pandemi di Indonesia juga belum sepenuhnya mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Hal ini tampak dari keterpisahan dan bahkan tarik-menarik peran dan tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat. Belum optimalnya upaya penanganan

ini misalnya tampak pada kebijakan intervensi 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dan 3T (*testing, tracing dan treatment*).

Pemerintah kerap menekankan peran penting masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan 3M guna menekan angka penularan virus. Pemerintah menilai persoalan hulu pandemi terletak pada kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya patuh pada protokol kesehatan. Penilaian ini diperkuat dengan hasil penelitian Kementerian Kesehatan yang menunjukkan walau tingkat penggunaan masker mencapai angka 93 persen namun hanya sekitar 54 persen responden yang selalu menjaga jarak dan 42 persen yang mencuci tangan dengan benar.

Sebagai penyeimbang perspektif yang mengutamakan aspek kedisiplinan masyarakat dalam penanganan pandemi, Dicky Budiman, epidemiolog dari Griffith University, menilai bahwa kemampuan pemerintah mencapai target pelaksanaan 3T juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia. Perihal target tes, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan standar pemeriksaan 1:1.000 warga untuk setiap pekan, dan rasio pelacakan kontak 1:30 untuk setiap kasus terkonfirmasi positif. Adanya standar ini mendorong 3T dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh di setiap daerah, bahkan ketika kasus melandai sekalipun.

Pada September 2021, pemerintah mengklaim telah mencatat rasio positif terendah sebesar 3,05 persen, jauh di bawah angka 30-40 persen yang tercatat pada lonjakan gelombang kedua di bulan Juli 2021. Rasio pada bulan September tersebut telah memenuhi standar minimum rasio positif WHO yang berada di angka 5 persen. Meski begitu, epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa standardisasi pelacakan kontak dan tes COVID-19 yang sudah ditetapkan pemerintah masih belum berjalan dengan baik di lapangan.

Implementasi pelacakan kontak yang sesuai dengan standar WHO hanya terjadi di DKI Jakarta. Sementara itu, untuk daerah-daerah di luar DKI Jakarta pelacakan kontak masih banyak yang belum berjalan sebagaimana mestinya, baik dari segi standar tes maupun pelacakan. Oleh karena

itu, meski rasio positif menurun, epidemiolog tidak menganggap hal tersebut sebagai jaminan tidak adanya lonjakan kasus di masa depan. Menanggapi kondisi ini, pemerintah semestinya menunjukkan proses pengumpulan data yang aktual dan akurat sehingga dapat dikonfirmasi dengan baik.

Untuk menekan angka kematian, upaya tes dan pelacakan sangat krusial untuk dilakukan agar infeksi bisa segera terdeteksi. Sayangnya, implementasi 3T masih belum dilakukan secara masif dan serius. Hal ini juga diperparah dengan ketidaksiapan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi pandemi. Fasilitas layanan kesehatan di Indonesia masih belum siap dalam menangani pandemi karena jumlahnya yang sangat minim.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh [katadata.co.id](http://katadata.co.id), rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia ada di angka 1,17 per 1.000 penduduk pada tahun 2018. Artinya, Indonesia hanya memiliki 1 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduknya. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang memiliki kurang lebih 11 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk. Rendahnya rasio ini diperparah dengan kondisi jumlah tempat tidur di tiap wilayah yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan infrastruktur dan akses terhadap kesediaan rumah sakit di masing-masing daerah. Di Indonesia, DKI Jakarta menjadi wilayah yang memiliki tempat tidur rumah sakit terbanyak dan mampu menyediakan 2 tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduknya.

Tidak hanya itu, rasio dokter di Indonesia untuk 1000 warga juga hanya 0,67 persen, sekitar setengah dari rata-rata kebutuhan dokter di Asia yang berada di angka 1,2 persen. Bahkan, di daerah Indonesia timur seperti Maluku dan Papua, 50 persen fasilitas layanan kesehatannya tidak memiliki dokter yang bertugas. Keterbatasan tenaga dan fasilitas kesehatan menjadi salah satu penyebab sulitnya menangani gelombang kedua pandemi pada Juli 2021.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga berkontribusi pada tingginya angka kematian akibat COVID-19. Banyak pihak menuding pemerintah gagal dalam menangani pandemi. Indikatornya yaitu meningkatnya

kasus infeksi COVID-19, tingginya angka kematian, serta banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan menjadi semakin miskin. Proyeksi peningkatan kemiskinan dari penelitian *SMERU Research Institute* menunjukkan bahwa masyarakat miskin akan bertambah hingga 12,4 persen. Artinya, pandemi akan membuat 8,5 juta penduduk Indonesia jatuh miskin. Ditambah lagi, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim/piatu selama pandemi juga belum mendapatkan kejelasan atas nasib mereka di masa depan.

Beberapa kritik tersebut direspons oleh Koordinator PPKM Darurat yang menyebutkan bahwa penanggulangan pandemi membutuhkan waktu. Ia juga menyatakan setidaknya terdapat tiga masalah utama penanganan pandemi, yaitu persoalan longgarnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, 3T yang tidak mencapai target, dan persoalan dalam pengambilan keputusan.

### **Peran Pemangku Kepentingan untuk Respons Kebijakan yang Lebih Kuat**

Berkaca dari perjalanan kebijakan terkait COVID-19 di atas, Indonesia seharusnya memiliki strategi tata kelola guna menciptakan ketangguhan sistem kesehatan Indonesia yang terkoordinasi dengan berbagai sektor. Tata kelola dalam konteks ini adalah proses pembuatan dan implementasi kebijakan terkait pandemi yang melibatkan kapasitas pembuat kebijakan lintas bidang, kepemimpinan pemerintah yang mumpuni, serta pelibatan masyarakat luas di dalam proses pembuatan kebijakan tersebut.

Sebagai pondasi, Indonesia harus melakukan penetapan respons penanganan pandemi yang jelas dan tepat waktu yang didukung dengan kebijakan yang relevan, sistem pemantauan dan evaluasi yang berjalan baik, serta kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan basis bukti yang kuat. Penanganan pandemi seharusnya berfokus menciptakan sistem kesehatan yang tangguh di Indonesia dan secara holistik terhubung menopang penanganan lintas bidang kehidupan lainnya.

Mengingat respons kebijakan terkait dengan pandemi yang seharusnya holistik, maka

dibutuhkan koordinasi dan kapasitas dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan sebagai aktor pembuat kebijakan. Selain itu, pemerintah sebagai pemegang kepemimpinan yang baik sejatinya juga harus mengadakan proses penyusunan kebijakan yang inklusif, akuntabel, dan transparan. Hal ini dapat dicapai melalui interaksi dengan masyarakat, termasuk di dalamnya mengikutsertakan para ahli, akademisi, tenaga kesehatan, serta perwakilan kelompok masyarakat di dalam proses pembuatan kebijakan secara terbuka.

Secara garis besar, pelibatan ini diharapkan dapat memberi pemahaman tentang bagaimana pandemi berdampak pada berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat di sini juga dapat menghasilkan kebijakan terkait pandemi yang dapat mengakomodir, menjamin pemenuhan, dan melindungi kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga bisa mengetahui arah dan langkah kebijakan penanganan COVID-19 yang diambil Indonesia secara jelas.

Lebih lanjut, kebijakan yang ada harus dipantau efektivitas implementasinya, ditinjau kesesuaiannya, dan diperbaiki sesuai kebutuhan. Hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk menyesuaikan kebijakan yang telah diambil. Relaksasi kebijakan atas dasar pertimbangan ekonomi sebaiknya dikaji dengan matang, sebab kondisi ekonomi akan tetap rentan dan tidak stabil selama Indonesia belum mampu keluar dari krisis pandemi.

Di tengah mulai terdeteksinya kasus Omicron di Indonesia, ini adalah saat yang krusial untuk merefleksikan pentingnya tata kelola yang melibatkan koordinasi lintas sektor dan beragam pemangku kepentingan dari masyarakat guna menghasilkan respons yang sigap dan tepat, tidak hanya pada pandemi kali ini, tetapi juga kondisi genting lainnya yang mungkin terjadi di masa depan.

#### **INFORMASI LEBIH LANJUT**

Penulis adalah Program Officer dan Program Assistant Yayasan Tifa [lamia@tifafoundation.id](mailto:lamia@tifafoundation.id)

Artikel ini bersumber dari: <https://www.tifafoundation.id/ulasan-dua-tahun-pandemi-refleksi-kebijakan-penanganan-COVID-19-di-indonesia>



# MEMANEN PALA BERKUALITAS UNTUK MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK

Oleh  
**SUMARNI SITUMEANG**

**A**dino, seorang petani tradisional di Desa Patimburak, Fakfak, dulu harus menerima harga pala yang rendah dan tidak menentu dari pihak tengkulak. Namun, kini Adino dan petani-petani pala lainnya, mulai meningkatkan mutu panen sehingga mereka bisa menjual hasil panen dengan harga yang lebih layak.

Adino sendiri adalah seorang transmigran dari Pulau Jawa yang menginjakkan kakinya di daerah perbukitan di Desa Patimburak untuk pertama kalinya pada 1998. Adino kemudian menikah dengan wanita asli di



Sumber foto: <https://tanibaik.inobu.org>

sana dan memiliki seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masing-masing berusia 10 tahun dan lima tahun.

Di sana, Adino belajar bahasa daerah dan cara hidup masyarakat lokal, termasuk budidaya pala tradisional yang diwariskan dari leluhur secara turun-temurun.

Namun, Adino dan petani lainnya mulai merubah dan memperbaiki teknik bertani mereka saat lembaga swadaya masyarakat lokal Yayasan Aspirasi Kaki Abu untuk Perubahan (AKAPe) dan Yayasan Inobu datang ke desanya di tahun 2016. Petani pala tradisional yang menjadi petani dampingan diajarkan teknik panen dan pascapanen yang benar untuk mutu pala yang

lebih baik dan harga jual yang lebih tinggi.

Petani dianjurkan untuk mengambil buah pala yang sudah matang dan memetik langsung dari pohon yang menjulang tinggi dengan menggunakan galah untuk mencegah buah pala jatuh ke tanah. Hal ini bertujuan agar pala tidak terkontaminasi aflatoksin.

Di sana, petani pria bertugas untuk memetik pala yang dari pohon yang memiliki tinggi sekitar 15 meter, dan petani wanita biasanya membantu mengumpulkan dan memilih buah pala yang sudah terlanjur jatuh ke tanah namun masih cukup bagus untuk dijual. Yang dicari oleh petani pala adalah biji pala dan fully, yakni lapisan luar pembungkus biji pala berwarna merah, sedangkan daging buah pala biasanya dibuang atau diolah menjadi manisan buah pala oleh ibu-ibu setempat.

Para petani juga merubah metode pengeringan mereka. Sebelumnya, hasil panen pala dikeringkan dengan teknik pengasapan menggunakan tungku masak dan dilakukan sendiri-sendiri atau bersama dengan keluarga. Sekarang, petani dampingan menyimpan dan mengeringkan hasil panen mereka di gudang dengan pemanas (*heater*) bertenaga surya. Dengan sistem pertanian kolektif ini, para petani mulai mencatat hasil panen dan penjualan mereka.

Peningkatan mutu panen membantu meningkatkan harga jual pala sekaligus menurunkan tekanan untuk membuka lahan baru untuk menanam pohon pala serta meningkatkan pendapatan para petani pala.



Hal ini berarti pelatihan panen dan pasca-panen membantu mengurangi deforestasi di Papua Barat jika diimplementasikan bersama dengan peraturan mengenai konservasi yang kuat.

Selain itu, petani pala juga terbantu dengan upaya optimalisasi rantai pasok distribusi untuk meningkatkan harga fully dan biji pala. Sebelumnya, Adino dan petani-petani lainnya harus menjual sendiri hasil panen mereka.

Letak Desa Patimburak yang jauh dari pusat kota menyebabkan petani harus menempuh perjalanan jauh untuk menjual hasil panen mereka. Dari desanya, Adino harus pergi menuju Distrik Kokas menggunakan perahu bermesin selama setidaknya 30 menit dan menyambung ke Kota Fakfak dengan angkot selama satu hingga dua jam angkot.

Di pusat kota, Adino masih harus menawarkan hasil panennya ke tengkulak, yang dikenal dengan sebutan penadah, dari pintu ke pintu

## Pelatihan panen dan pascapanen membantu mengurangi deforestasi di Papua Barat jika diimplementasikan bersama dengan peraturan mengenai konservasi yang kuat.

demi mendapatkan harga tertinggi. Dengan sistem jual-beli komoditas pertanian seperti ini, harga ditentukan oleh pihak tengkulak saja.

Para petani dampingan tak perlu lagi berdagang dengan cara seperti itu. Mereka hanya perlu pergi ke Distrik Kokas untuk



Sumber foto: <https://tanibaik.inobu.org>

menjual hasil panen mereka ke AKAPe dengan harga yang lebih layak karena mutu panen telah diukur dengan jelas.

Melalui sistem pemasaran yang baru ini, Desa Patimburak menghasilkan panen hingga 500 kilogram dan menghasilkan 40 juta rupiah pada musim timur kemarin. Adino sendiri, yang memiliki kebun pala dengan luas kurang dari setengah hektar, mendapatkan 2,3 juta rupiah untuk hasil panen pala sejumlah 20 kilogram. Jika menggunakan sistem penjualan yang lama, Adino hanya mendapatkan sekitar 1,3 juta rupiah untuk jumlah panen yang sama.

Pendapatan yang meningkat ini memungkinkan Adino untuk mulai menabung untuk pendidikan anak-anaknya nanti.

“Uang lebihnya disimpan untuk sekolah anak-anak saya,” ujar Adino. “Saya harap harga pala bisa menjadi lebih baik lagi.”

Adino, seorang petani tradisional pala, sedang menunggu musim panen di Desa

Patimburak, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Musim panen, yang terjadi dua kali dalam satu tahun, dikenal dengan musim timur dan musim barat.

Setiap mendekati musim barat, yang di mulai dari Oktober hingga November, Adino merasa bersemangat lantaran hasil panennya akan lebih banyak dibandingkan dengan musim timur, yang dimulai dari April hingga Mei.

“Hasil panen tergantung dengan cuaca, tapi di musim barat hasilnya lebih banyak dibandingkan musim timur,” ujar Adino.

Adino hafal betul dengan siklus panen dan kondisi hutan pala miliknya yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Terang saja, Adino telah bekerja sebagai petani pala selama puluhan tahun.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari: <https://tanibaik.inobu.org/adino-memanen-pala-berkualitas-untuk-masa-depan-yang-lebih-baik>

**N**uur Faridatun Hasanah, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sedang mengembangkan perangkat pemantauan antibodi untuk melawan COVID-19. Seorang peneliti BRIN lainnya, Nugroho Adi Sasongko, memimpin penggunaan instrumen *audit manufacturing* agar dapat lebih ramah lingkungan.

Para peneliti ini adalah bagian dari akademisi BRIN yang memperoleh gelar pendidikan pasca sarjana melalui program beasiswa yang diberikan antara tahun 2013-2021 melalui proyek *Research and Innovation in Science and Technology* (RISET) yang didukung oleh Bank Dunia. Proyek RISET telah memperkuat ranah sains, teknologi dan inovasi di Indonesia untuk mengembangkan solusi terhadap tantangan nasional maupun global dan telah menunjukkan jalan untuk kelanjutan di bidang ini.

Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, berusaha keras untuk meletakkan posisinya di kancah ekonomi global, dan mengakui bahwa peningkatan sumber daya manusia serta kapabilitas nasional di bidang sains dan teknologi



# MELAHIRKAN LEBIH BANYAK PENELITI DAN ILMUWAN DI INDONESIA

Oleh **RATNA KESUMA, PETRA WIYAKTI BODROGINI**





Ilustrasi: Freepik.com

menjadi hal yang sangat penting untuk mencapainya. Lebih lanjut, Indonesia juga memahami bahwa inovasi dalam negeri akan dapat mengembangkan solusi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat lokal.

Proyek Riset telah membantu melalui penguatan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia, termasuk pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (KST), dan Kantor Alih Teknologi (KAT). Walaupun relatif baru, KAT dimaksudkan untuk membuat loncatan dari inovasi ke penerapan teknologi, dan dapat mempercepat industrialisasi dari produk-produk penemuan baru.

**Proyek Riset telah menciptakan lebih dari 2.600 peneliti dari lembaga-lembaga penelitian seperti BRIN dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang saat ini memimpin atau berkolaborasi dalam penelitian di berbagai sektor sosial dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional.**

Salah satu contoh bagaimana KST-KST ini beroperasi adalah Kawasan Teknologi Pertanian Polewali Mandar di Sulawesi Barat, yang

berfokus pada penelitian yang menghasilkan pengembangan varietas produk pertanian, termasuk padi, kedelai, dan fermentasi jerami untuk pakan ternak. Kawasan ini juga memberikan pendampingan bagi petani lokal untuk memproduksi tempe berkualitas dan meningkatkan nilai ekonomi dari jerami.

Proyek Riset telah menciptakan lebih dari 2.600 peneliti dari lembaga-lembaga penelitian seperti BRIN dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang saat ini memimpin atau berkolaborasi dalam penelitian di berbagai sektor sosial dan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kelompok peneliti ini telah berkontribusi dalam berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Para peneliti ini juga terlibat dalam proyek-proyek unggulan nasional, termasuk di antaranya: Sistem Peringatan Dini Tsunami; Sistem Kontrol Penerbangan; Pembangkit Listrik Energi Limbah; dan Inovasi untuk Sistem Pemerintahan Digital.

Lebih jauh lagi, para alumni Riset telah menunjukkan pengaruh mereka di berbagai hal. Para peneliti ini telah mempublikasikan artikel-artikel ilmiah di berbagai jurnal ilmiah dan mendaftarkan paten mereka, misalnya dalam Sistem Kalibrasi Alat Ukur Kebisingan dan Sistem Peringatan Dini Gempa Berbasis Ponsel Pintar. Beberapa alumni beasiswa Riset saat ini telah kembali dan mengambil peran di BRIN, memungkinkan mereka untuk memberi pengaruh terhadap pengembangan sains, teknologi dan inovasi dan memastikan bahwa pengembangan teknis yang terjadi telah sesuai dengan prioritas nasional. Beberapa alumni Riset telah ditunjuk sebagai kepala beberapa pusat penelitian dan teknologi untuk menangani berbagai bidang, termasuk diantaranya siklus produksi yang berkelanjutan, penelitian pemrosesan makanan, dan mikrobiologi terapan.

Sebuah komitmen untuk meningkatkan sains, teknologi, penelitian dan penerapannya di Indonesia, telah membuat capaian-capaian ini terjadi. Model-model bisnis yang dirintis di

beberapa KST dan KAT, serta pendekatan baru terhadap pengembangan sumber daya manusia telah mengarah ke reformasi sistemik, yang pada akhirnya memberikan masukan terhadap Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Salah satu hasil dari reformasi ini adalah platform *online* Monev Risbang yang berfungsi memonitor implementasi, topik, dan alokasi anggaran penelitian.

Melihat ke depan, fokus jangka pendek dari sains, teknologi, dan inovasi di Indonesia akan menitikberatkan pada *green technology* dan pemulihan ekonomi berkelanjutan dari pandemi COVID-19. Sedangkan untuk jangka panjang, proyek Riset telah menunjukkan hal-hal apa yang efektif dalam memajukan penelitian dan sains terapan. Pelajaran utama yang telah dipetik adalah:

- Jejaring yang dilakukan secara regular antar pemangku kepentingan akan meningkatkan kolaborasi penelitian;
- Melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam skema pendanaan akan memastikan terlaksananya penelitian dan inovasi;
- Tata kelola kelembagaan yang kuat akan menciptakan iklim kerja yang dapat meningkatkan kinerja; dan
- Keterlibatan masyarakat (*citizen engagement*) sangat penting untuk merealisasikan potensi akademik, sosial, dan ekonomi secara penuh, dari sebuah proyek.

Didukung oleh strategi nasional, melakukan pembinaan para inovator sains dan teknologi untuk masa depan seperti yang telah dilakukan Riset, dapat menjadi komponen penting dalam pembangunan Indonesia. Hal ini memberikan jalan bagi peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

#### INFORMASI LEBIH LANJUT

Sumber: <https://katadata.co.id/rezzaaji/indepth/62e74952601ad/krisis-iklim-dalam-agenda-politik-elektoral-2024>



DISKUSI ONLINE LIVE

## Instagram Story @infobakti



### Geng Motor Imut Berkelana Mengembangkan Pertanian dan Peternakan NTT

Apa yang terlintas di pikiran Anda jika mendengar nama geng motor? Sekelompok orang dengan motor berkonvoi dengan suara knalpot memekakkan telinga? Atau mungkin sekelompok orang yang akrab dengan keributan?

Di Kupang, Nusa Tenggara Timur ada geng motor dengan nama yang unik, Geng Motor Imut (GMI). Imut merupakan singkatan dari Inovasi, Mobilisasi untuk Transformasi. Di balik namanya yang unik, GMI punya aktivitas yang patut menjadi inspirasi. Penasaran dengan geng motor ini? Mari ikuti perbincangan kami dengan Arry Pellokila, Praktisi Praktik Cerdas Geng Motor Imut.



### Bendera SASKIA untuk Kesehatan Ibu dan Anak

Bapak Iwan Setiawan (Kepala Puskesmas Sinoa Kec, Sinoa Kab. Bantaeng) berbagi cerita tentang Inovasi Bendera SASKIA (Satu Bendera Satu Sasaran Kesehatan Ibu dan Anak) bendera penanda yang membantu petugas Puskesmas mengetahui sasaran kesehatan ibu dan anak.

Berawal dari kesulitan petugas kesehatan menemukan lokasi sasaran KIA sehingga status kesehatan ibu hamil tidak terkontrol secara berkala, masih terdapat bayi yang belum memperoleh imunisasi dasar lengkap, dan masih terdapat balita dengan status gizi kurang.

Selengkapnya kunjungi <https://www.instagram.com/infobakti/channel>

## Podcast BASUARA



### Saling Berdaya di Tengah Pandemi

Menghadapi pandemi COVID-19 setahun lalu, hampir semua orang merasakan berada di situasi yang bingung, ketakutan serta tidak tahu kita harus berbuat apa, apalagi untuk perempuan yang kelas menengah ke bawah yang memang menggantungkan kebanyakan menggantungkan hidupnya pada penghasilan suami, harus memutar otak agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi di saat suami sebagai pencari nafkah turut terimbas pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan.

Podcast BASUARA (BaKTI Pu Suara) adalah tempat berbagai cerita yang memberi inspirasi, memperkaya pengetahuan dari beberapa narasumber yang berkompeten untuk mendorong meningkatnya kreativitas masyarakat dalam menjawab tantangan pembangunan.

Kunjungi Podcast Basuara melalui <http://bit.ly/basuara>

### Urgensi Pendidikan Gender dan Tinjauan HAM pada Isu Gender

Masih dalam euforia masa orientasi pengenalan kampus, beberapa kejadian di kampus-kampus pun sempat viral di linimasa media sosial. Sebut saja soal ospek di salah satu universitas yang dianggap 'ketinggalan zaman' karena masih terdapat tradisi senior yang meneriaki mahasiswa barunya. Baru-baru ini, mahasiswa baru asal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang mengaku non-biner atau non binary berujung diusir oleh dosennya.

Peristiwa yang bermula dari mahasiswa tersebut yang ditanyai terkait jenis kelaminnya oleh dosen sukses menyita perhatian publik, khususnya di Twitter. Seperti biasanya, terdapat banyak pendapat pro kontra, antara mendukung keputusan dosen untuk mengeluarkan mahasiswa tersebut karena penyimpangan dan mendukung mahasiswa tersebut karena berani mengekspresikan identitas gendernya. Lantas, bagaimana kita melihat kasus ini dalam perspektif HAM dan pendidikan? Apakah tindakan dosen tersebut benar guna mencegah adanya perilaku merawat penyimpangan dalam civitas pendidikan? Atau justru kasus ini menunjukkan tidak inklusifnya institusi pendidikan bagi semua kalangan mahasiswa?

- <https://www.batukarinfo.com/komunitas/articles/urgensi-pendidikan-gender-dan-tinjauan-ham-pada-isu-gender>

## Publikasi Terbaru



### Menata Kelola Data Demi Pelayanan Publik: Studi Kasus Tata Kelola Data Sektor Kesehatan dan Pendidikan di Indonesia selama Pandemi COVID-19

Mengingat peran penting data dalam pelayanan publik, *Centre for Innovation Policy and Governance* (CIPG) dan Yayasan TIFA melakukan riset pada dua sektor utama layanan publik yang sangat terpengaruh oleh pandemi COVID-19, yaitu kesehatan dan pendidikan, khususnya pada 5 jenis layanan publik yaitu: (1) beban layanan kesehatan, (2) penelusuran kontak, (3) vaksinasi, (4) bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh, dan (5) pembukaan sekolah untuk pertemuan tatap muka.

Melalui studi kasus pada tingkat nasional (Indonesia), tingkat provinsi (Jawa Barat), dan tingkat kota/kabupaten (Kota Pontianak), riset ini mengungkap bahwa praktik tata kelola data sektor kesehatan belum memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal selama pandemi. Di sisi lain, pelayanan publik sendiri merupakan upaya negara memenuhi hak warga. Ketika pelayanan publik ditopang oleh tata kelola data yang belum memadai, warga pun kesulitan mengakses layanan publik yang menjadi haknya.

- <https://www.batukarinfo.com/referensi/menata-kelola-data-demi-pelayanan-publik-studi-kasus-tata-kelola-data-sektor-kesehatan-dan>

## Berita Terbaru

### LRC Lakukan Survey Penggunaan Lahan di Lombok Timur, Untuk Mendorong Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Pembangunan pertanian di Kabupaten Lombok Timur dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini berdampak pada produktifitas dan nilai tukar petani pun mengalami hal yang sama. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) terkait dengan produktivitas beberapa komoditi unggulan pertanian Lombok Timur mengalami penurunan yang cukup besar.

Komoditas pertanian sektor tanaman pangan di Kabupaten Lombok Timur masih didominasi oleh Padi, Jagung, dan Ubi Kayu. Produksi Padi pada tahun 2021 di Kabupaten Lombok Timur mencapai 397.343 ton, sedangkan produksi Jagung pada tahun yang sama mencapai 151.849 ton dan diikuti oleh tanaman Ubi Kayu sebanyak 16.445 ton.

- <https://www.batukarinfo.com/news/lrc-lakukan-survey-penggunaan-lahan-di-lotim-untuk-mendorong-pembangunan-pertanian-o>